JustJobs NETWORK

PIKUL
LINGKAR BELAJAR KOMUNITAS BERVISI

CENTRE FOR POLICY RESEARCH

RESEARCH REPORT

Laporan Kasus Kota: Kupang, Nusa Tenggara Timur

KOTA-KOTA KECIL, KABUPATEN URBAN DI INDONESIA

Garis Depan Tantangan-Tantangan Ketenagakerjaan, Migrasi dan Urbanisasi

November 2018



JustJobs NETWORK

PIKUL
LINGKAR BELAJAR KOMUNITAS BERVISI

CENTRE FOR POLICY RESEARCH

RESEARCH REPORT

Laporan Kasus Kota: Kupang, Nusa Tenggara Timur

KOTA-KOTA KECIL, KABUPATEN URBAN DI INDONESIA

Garis Depan Tantangan-Tantangan Ketenagakerjaan, Migrasi dan Urbanisasi

November 2018

IDRC | CRDI
International Development Research Centre
Centre de recherches pour le développement international

Think Tank Initiative

Diterbitkan pada bulan November 2018 oleh JustJobs Network Inc.

Ucapan terima kasih

Laporan ini merupakan bagian dari sebuah riset yang menelaah kota-kota kecil di India dan Indonesia dari kacamata lapangan kerja, migrasi, dan kaum muda. Inisiatif ini dapat terlaksana melalui pendanaan dari International Development Research Centre (IDRC) dan Think Tank Initiative (TTI). Kami berterima kasih kepada kedua lembaga, dan terutama program officer Seema Bhatia-Panthaki dan Navsharan Singh, yang memungkinkan kami untuk mengeksplorasi isu-isu kritis pembangunan secara kreatif dan bermakna.

Laporan ini dihasilkan oleh Perkumpulan Pikul berkolaborasi dengan JustJobs Network, pada tahun 2017 and 2018. Secara khusus, Pikul mengucapkan terima kasih kepada Conny Herta Tiluata, dan Septiani C. Suyono atas dedikasi yang tulus dalam melakukan pengumpulan dan analisis data. Dan juga ucapan terima kasih disampaikan kepada Rido Hambandima, Elisabeth Umbu Tara, Arry Pellokila, Dedi Pah, Ciko Jacob, dan Alfrid Riwu atas kerja keras mereka dalam survey lapangan. Terima kasih juga kepada Wakil Walikota Kupang, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang, yang mendung penelitian ini.

Laporan ini merupakan upaya kolaboratif dengan penulis utama Gregory Randolph dari JustJobs Network dan Pantoro Tri Kuswardono dari Perkumpulan Pikul.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi
www.justjobsnetwork.org
www.cprindia.org

Foto sampul
"R1_2013-01-07 15.09.35_06683 traditionele markt"
(https://bit.ly/2Aakyiz)
Photo by Michel Coumans. Some rights reserved.

DAFTAR ISI

Pengantar **01**

Kupang: Mendudukkan Konteks **03**

Sejarah 03
Ekonomi dan Tenaga Kerja 06
Geografi 09
Pemerintahan 11

Migrasi, Kehidupan, dan Pekerjaan Sehari-hari di Kupang Temuan dari Data Primer **12**

Siapa yang datang ke Kupang? 12
Bagaimana pengalaman para migran tentang bursa tenaga kerja di Kupang? 15
Bagaimana para migran mengaitkan dirinya dengan kota? 20

Tantangan-Tantangan Utama di Kupang untuk Menciptakan Bursa Tenaga Kerja yang Inklusif **22**

Pusat kemakmuran atau atau pusat ketidakpast ian ? 22
Potensi migran dan kaum muda yangbelum tergali 22
Ketidakcocokan antara harapan pencari kerja dan pemberi kerja 24
Sumber Daya Publik yang Terfragmentasi 25

Rekomendasi Kebijakan **26**

Kesimpulan: Menciptakan ekonomi inklusif dan padat karya di Kupang **31**

Pengantar

Di Indonesia dan juga di banyak negara berkembang lainnya, fokus dari kebijakan dan studi perkotaan sering kali berkutat pada kota-kota besar. Proses urbanisasi di Indonesia umumnya dibayangkan sebagai arus perpindahan penduduk dari desa ke Jakarta untuk mencari penghidupan yang lebih layak – melahirkan kebijakan jahat "kota tertutup" di ibu kota dan seruan berkala untuk memindahkan ibu kota ke tempat lain.[1,2] Dalam kenyataannya, proses transformasi struktural, urbanisasi, dan pembangunan ekonomi di Indonesia jauh lebih kompleks, seperti yang digambarkan oleh Terry McGee tentang Jawa sebagai sebuah kumpulan *desakota* – sebuah jalinan erat dan utuh antara aktivitas ekonomi pedesaan dan perkotaan yang tidak bisa dipisahkan oleh batas sederhana desa dan kota.[3]

Urbanisasi Indonesia dan proses pembangunan ekonomi saat ini terus berkembang – di mana lebih dari separuh wilayah Indonesia kini telah menjadi urban – daerah urban di luar Jakarta semakin bertumbuh. Selama dua puluh tahun terakhir, kota menengah dengan jumlah penduduk antara 500.000 sampai 1 juta jiwa telah memaksimalkan manfaat dari ekonomi aglomerasi.[4] Sebagian besar pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia sekarang terjadi di kota kecil dan menengah; dengan jumlah penduduk perkotaan yang diperkirakan akan tumbuh sebesar 30,7 juta jiwa antara tahun 2010 dan 2025, 85 persen dari penduduk baru ini akan terserap di wilayah perkotaan yang penduduknya kurang dari 750.000 jiwa.[5] Gejala penting lain adalah bertumbuhnya *desakota* – sebuah fenomena yang digambarkan oleh McGee – khususnya di Jawa di mana perusahaan-perusahaan seperti industri manufaktur berpindah ke tempat yang harga tanah dan upah buruhnya lebih rendah. Transformasi desa menjadi kota ini terjadi di seluruh bagian Indonesia yang secara administratif bukan menjadi wilayah perkotaan. Pada tahun 2015, sekitar 60 persen penduduk urban tinggal di luar wilayah kota secara administratif – artinya mereka tinggal di kawasan pinggiran kota besar atau wilayah kabupaten yang "mengota" – dan persentase ini naik terus dari angka 28 persen di tahun 1971 dan 57 persen di tahun 2010.[6]

Di saat terjadinya pertumbuhan wilayah perkotaan terutama di kota-kota kecil dan menengah serta kota-kota di kabupaten,[i] Indonesia menghadapi tantangan besar untuk menciptakan lapangan kerja produktif untuk angkatan kerja yang semakin besar. Sekarang ini adalah saat untuk memanfaatkan "bonus demografi" yang sudah diantisipasi sejak lama. Populasi angkatan kerja di Indonesia telah tumbuh pesat dalam beberapa dekade terakhir, dan rasio ketergantungan akan mencapai titik terendah pada tahun 2030.[7] Indonesia pada saat ini berada pada titik transformasi demografi

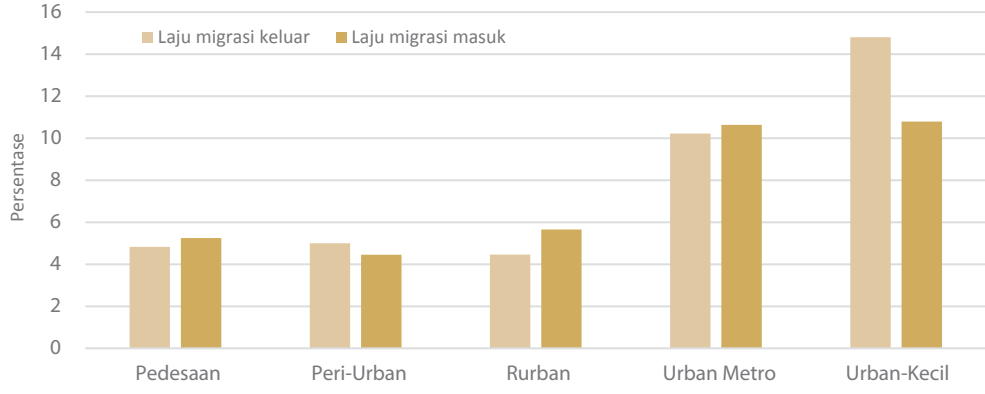
[i] Kabupaten yang 'mengota' didefinisikan sebagai kabupaten yang laju urbanisasinya paling tidak 27 persen, atau separuh dari angka laju urbanisasi Indonesia pada tahun 2015.

yang sama dengan yang dialami negara-negara maju saat melakukan lompatan besar dengan menumbuhkan kelas menengah melalui lapangan kerja produktif.

Oleh karena itu, kesempatan bonus demografi ini bertepatan dengan bertumbuhnya kota-kota kecil dan menengah, kawasan 'rurban' dan peri-urban. Dengan kata lain, wilayah-wilayah perkotaan di luar kota-kota besar Indonesia menjadi garis depan dari beberapa tantangan terbesar pembangunan negara ini yaitu: mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, menciptakan kesempatan kerja bagi generasi muda, dan memanfaatkan potensi produktif dari urbanisasi. Kota-kota non-metropolitan – yang didefinisikan sebagai kota di luar sembilan metropolitan terbesar[ii] – memiliki laju urbanisasi yang lebih besar daripada kota-kota besar ataupun kawasan pinggirannya (lihat **Gambar 1**). Sekitar setengah dari penduduk pedesaan pindah ke kota-kota kecil dan menengah ini untuk mencari kesempatan belajar; ini menunjukkan bahwa semakin banyak remaja Indonesia – yang sedang mencari mobilitas ekonomi dan keahlian yang bisa dijual – tertarik ke ibu kota provinsi atau kabupaten, di luar kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan.[8] Sementara itu, kabupaten 'rurban' yang sekarang menjadi karakteristik banyak wilayah pulau terpadat di Indonesia, berkembang pola migrasi campuran yang rumit – perpindahan kaum urban ke sub-urban dan peri-urban, migrasi sirkuler antara pedesaan

Gambar 1

Migrasi Masuk dan Keluar untuk Semua Kategori Geografi di Indonesia, 2015[iii]



Sumber: SUPAS 2015

[ii] Sembilan kota metropolitan Indonesia didefinisikan berdasarkan laporan tahun 2012 untuk Bank Dunia (Ellis, P. (2012). The Rise of Metropolitan Regions: Towards Inclusive and Sustainable Regional Development in Indonesia. Jakarta: World Bank. Diunduh dari:http://www.worldbank.org/en/news/feature/2012/08/13/towards-inclusive-and-sustainable-regionaldevelopment).Kawasan ini didefinisikan sebagai pusat urban beserta kawasan penyangga yang mengelilinginya: Balikpapan/Samarinda, Bandung, Denpasar, Jakarta, Makassar, Manado, Medan, Semarang, and Surabaya.

[iii] Di dalam grafik ini, metro urban mengacu pada kota (secara administratif) yang terletak pada sembilan kawasan metropolitan (lihat Catatan kaki 1); non-metro urban mengacu pada kota di luar sembilan metropolitan; peri-urban mengacu pada kota-kota kabupaten di kawasan metropolitan; dan rurban mengacu pada kota-kota kabupaten di luar kawasan metropolitan. Sebuah kabupaten disebut mengota apabila laju urbanisasinya mencapai paling tidak setengah rata-rata Indonesia, yaitu 27 persen berdasarkan angka tahun 2015, di saat angka rata-rata di Indonesia mencapai 54 persen.

dan pemukiman 'rurban' pekerja pabrik, dan meningkatnya arus komuter di banyak lalu lintas.

Beragamnya pemukiman perkotaan – dari kota kecil sampai kabupaten peri-urban – menggambarkan berbagai macam kesempatan serta risiko bagi kaum muda yang sedang mencari penghasilan di perkotaan. Di pihak lain, data menunjukkan bahwa wilayah ini adalah pusat tumbuhnya kewirausahaan: 3,7 persen pekerja muda (usia 15-29) di kota kecil dan 6,1 persen di kabupaten kota adalah pemilik usaha yang paling tidak mempekerjakan satu orang pekerja lain, dibandingkan dengan angka hanya 3,1 persen di kota besar. Namun, sejumlah besar kaum muda bekerja di sektor marginal atau tanpa perlindungan dan jaminan kerja. Hampir 17 persen dari pekerja muda di kota non-metropolitan dan 39,6 persen di kabupaten kota adalah pekerja mandiri, tanpa upah atau serabutan; di kota besar angkanya hanya mencapai 11,4 persen.[9]

Keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan peluang urbanisasi dan transformasi demografis ini akan bertumpu sebagian besar pada kemampuannya memajukan pengembangan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja di kota-kota kecil dan kabupaten, termasuk di antaranya mengembangkan potensi para pekerja migran muda yang sedang mencari pendidikan dan keahlian serta menciptakan iklim bagi bertumbuhnya usaha skala kecil dan menengah. Ringkasan kebijakan ini berfokus pada sebuah kota di Indonesia Timur, Kupang, di mana masalah ini jelas mendesak. Laporan ini akan menggunakan data sekunder dalam menjelaskan konteks Kupang, termasuk sejarah dan ekonomi lokal, menunjukkan penemuan dari data primer yang diambil pada tahun 2017 dan 2018, dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengembangkan potensi Kupang sebagai sebuah pusat mobilitas sosial ekonomi di Indonesia Timur.

Kupang: Mendudukkan Konteks

Kupang adalah ibu kota dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di ujung tenggara Indonesia. Meskipun menghadapi kendala dalam pembangunan dan pemerintahan, kota ini tetap berkembang menjadi salah satu pusat kemakmuran di tengah salah satu provinsi paling miskin di Indonesia. Meskipun angka Indeks Pembangunan Manusia di Kupang mendekati angka di Jakarta (lihat **Tabel 1**), wilayah kabupaten di sekelilingnya adalah wilayah yang paling tertinggal di Indonesia, mengingat beberapa alasan historis dan geografis. Pertumbuhan dan perubahan kota Kupang yang cepat harus disadari dalam konteks perannya sebagai sentra politik dan ekonomi yang menjadi saksi tingginya migrasi akibat kesengsaraan.

SEJARAH

Dari abad ke-17 sampai ke-19, Kupang berkembang sebagai gerbang perdagangan kayu

Tabel 1

Kota Kupang dalam Konteks Nusa Tenggara Timur, 2017

Kota/ Kabupaten	Tingkat Pengangguran Terbuka, 2015	Harapan Hidup	Rata Rata Tahun Sekola	Tahun Sekolah Pengeluaran Tahunan	HDI	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Pertumbuhan, 2012-2015 (%)
Sumba Barat	1.8	66.2	6.5	6997.0	62.3	29.3	4.8
Sumba Timur	3.1	64.1	6.7	9093.0	64.19	31.0	5.0
Kupang	4.2	63.5	7.1	7301.0	62.79	22.9	5.1
Timor Tengah Selatan	3.5	65.7	6.4	6676.0	61.08	29.4	4.4
Timor Tengah Utara	1.9	66.2	7.1	6164.0	62.03	23.5	4.7
Belu	5.4	63.4	7.1	7251.0	61.44	16.0	5.4
Alor	3.6	60.5	7.8	6553.0	59.61	21.7	4.9
Lembata	3.1	66.2	7.6	7084.0	63.09	26.5	5.0
Flores Timur	3.9	64.5	7.1	7442.0	62.89	10.8	4.6
Sikka	0.7	66.3	6.6	7855.0	63.08	14.2	4.4
Ende	3.4	64.5	7.6	8841.0	66.11	24.0	5.1
Ngada	1.3	67.4	7.9	8649.0	66.47	12.8	4.7
Manggarai	4.0	65.8	7.0	7056.0	62.24	21.9	5.0
Rote Ndao	2.4	63.4	7.0	6320.0	60.51	28.8	5.0
Manggarai Barat	2.4	66.2	7.1	7269.0	61.65	18.9	4.5
Sumba Tengah	3.8	67.7	5.5	5946.0	59.39	36.0	4.8
Sumba Barat Daya	2.9	67.8	6.3	6134.0	61.46	30.1	4.6
Nagekeo	2.0	66.4	7.5	8119.0	64.74	13.5	4.6
Manggarai Timur	2.2	67.4	6.5	5643.0	58.51	26.8	5.2
Sabu Raijua	7.8	59.0	6.0	5120.0	55.22	31.1	5.0
Malaka	4.1	64.3	6.3	5726.0	58.9	16.5	4.9
Kota Kupang	**14.3**	**68.6**	**11.5**	**13028.0**	**78.25**	**9.8**	**6.6**
Nusa Tenggara Timur	3.8	66.1	7.2	7350.0	63.73	21.9	4.9

Sumber: BPS, Statistik Indonesia

Peta 1

Kota Kupang dalam Konteks Nusa Tenggara Timur



Source: Peta Administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur

cendana dan lilin lebah – meskipun pelabuhan Kupang tetap saja kecil pada era ini – dan pada era kolonial, kota ini juga menjadi pos militer terluar Portugis dan kemudian juga pada masa Belanda.[10,11,12] Pada paruh pertama abad ke-20, pada masa "Pax Neerlandica", Kupang tetap menjadi sebuah kota digerakkan oleh aktivitas perdagangan dan administratif berkaitan dengan pengerukan sumber daya dari Indonesia bagian tenggara.[13]

Peran Kupang dalam sistem jaringan perkotaan Indonesia tidak banyak berubah setelah Indonesia merdeka. Paradigma pembangunan ekonomi yang diletakkan pada masa kolonial tetap bertahan – berhadapan dengan Jawa sebagai pusat industri dan pulau-pulau terpencil di sekitarnya, termasuk pulau-pulau di sekitar Kupang – Kupang umumnya berfungsi pusat pengerukan sumber daya. Aktivitas industri – di sebagian besar wilayah – jauh lebih sedikit untuk tempat seperti Kupang dibandingkan dengan pulau yang berpenduduk padat seperti Jawa dan Sumatra.

Secara historis Kupang tidak begitu berbeda dengan kota lain di wilayah ini dalam hal aktivitas ekonomi; perubahan penting terjadi setelah tahun 1958, di saat kota ini menjadi ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sejak itu

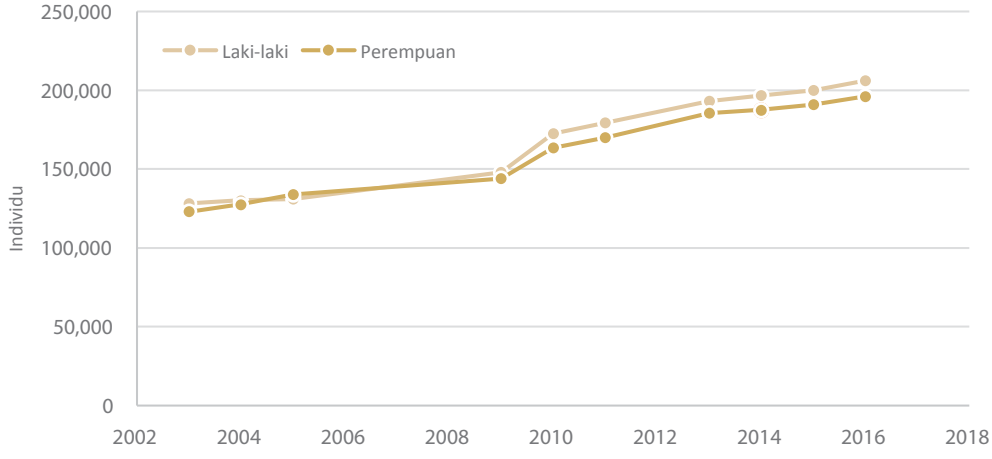
menumbuhkan lapangan kerja di sektor publik. Pertumbuhan dan pembangunan yang disponsori negara ini bertambah cepat mengikuti era desentralisasi pada tahun 1998, karena sebagian besar otoritas dan banyak sumber daya dialihkan ke pemerintah daerah. Selama 13 tahun terakhir, jumlah penduduk Kupang bertambah pesat – dari 291.794 pada tahun 2009 menjadi 402.286 pada tahun 2016 (lihat **Gambar 2**) – di saat sektor jasa berkembang dan volume migrasi dari desa-desa di Nusa Tenggara Timur bertambah. Migrasi laki-laki menyebabkan jumlah penduduk laki-lak naik lebih cepat daripada jumlah penduduk perempuan di Kupang.

EKONOMI DAN TENAGA KERJA

Kupang tidak pernah membangun sektor industri besar, aktivitas ekonomi dan lapangan pekerjaan terpusat pada sektor jasa – khususnya pada jasa informal dan jasa yang tidak bisa diperdagangkan. Pekerja laki-laki di Kupang bekerja pada sektor jasa yang cukup beragam: keuangan, transportasi, konstruksi, dan usaha dagang, dan juga layanan jasa umum – sebuah sektor yang meliputi hiburan, olahraga dan rekreasi, kegiatan budaya, aktivitas nirlaba, dan rumah tangga (seperti pembantu rumah tangga). Pekerja perempuan, di lain pihak, bekerja terutama di sektor jasa umum dan usaha dagang (lihat **Gambar 3**). Komposisi PDB (Produk Domestik Bruto) Kupang (lihat **Gambar 4**) lebih memperjelas dominasi sektor jasa, khususnya pada subsektor yang banyak mempekerjakan para pekerja informal. Sektor konstruksi adalah penyumbang terbesar ekonomi Kupang, sementara jasa bengkel kendaraan dan usaha dagang berada pada urutan kedua. Sektor-

Gambar 2

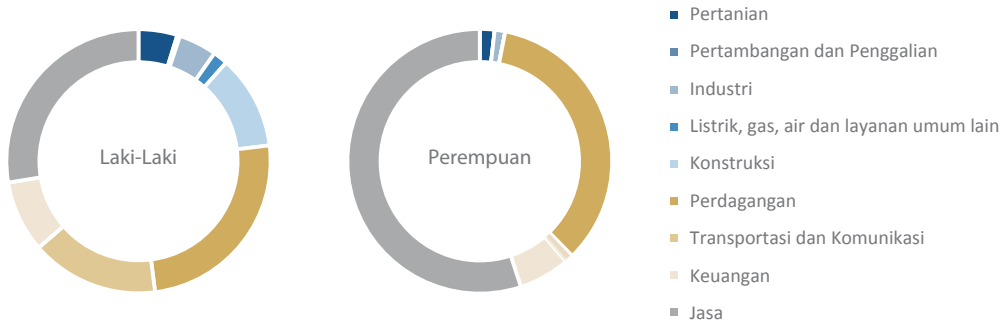
Pertumbuhan Populasi di Kupang, 2003-2016



Sumber: BPS Kota Kupang, 2005-2015

Gambar 3

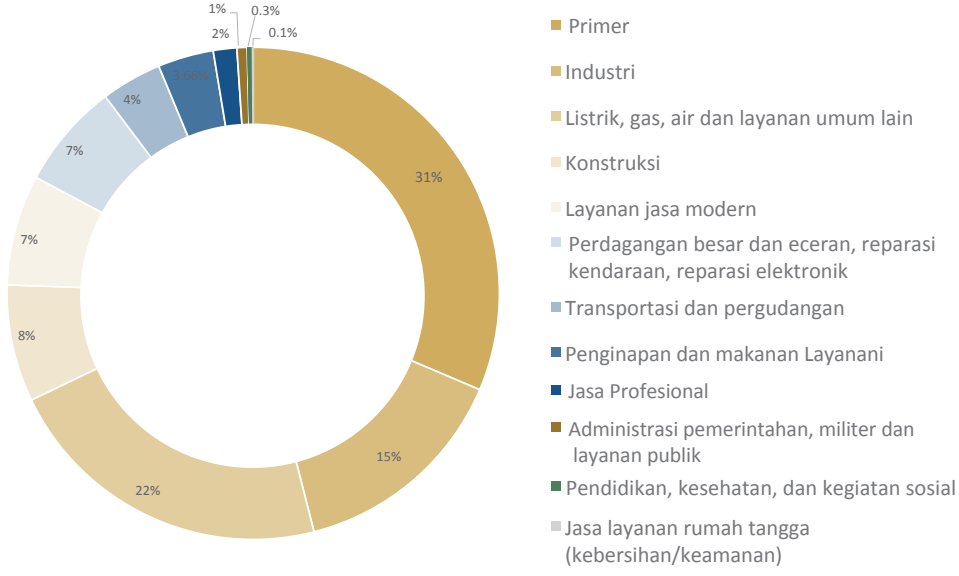
Komposisi Sektoral Ketenagakerjaan di Kupang, 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kupang, 2015

Gambar 4a

Kontribusi Sektoral terhadap PDB pada tahun, 2016

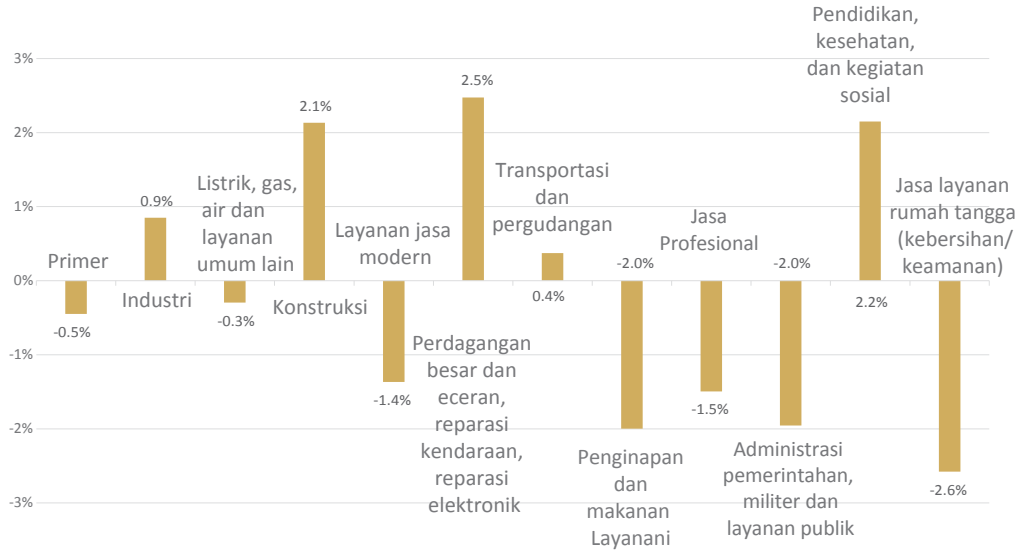


Catatan: Layanan jasa modern meliputi: Informasi dan komunikasi; Keuangan dan asuransi; Jasa properti; Seni, hiburan, dan rekreasi

Sumber: Kota Kupang Badan Pusat Statistik , 2016

Gambar 4b

Tingkat Pertumbuhan Tahunan Gabungan Sektor di Kupang, 2008-2016



Catatan: Layanan jasa modern meliputi: Informasi dan komunikasi; Keuangan dan asuransi; Jasa properti; Seni, hiburan, dan rekreasi

Sumber: Kota Kupang Badan Pusat Statistik, 2008-2016

sektor lain seperti informasi dan komunikasi, keuangan, dan properti – meskipun menduduki peringkat penyumbang PDB yang tinggi – hanya mempekerjakan sedikit orang, artinya sektor tersebut mempekerjakan orang yang produktif dan lebih langka. Struktur bursa tenaga kerja yang terpolarisasi seperti ini,[14] atau lebih sederhananya terbagi menjadi bursa tenaga kerja yang "kasar dan kantoran",[15] adalah karakteristik ekonomi yang sangat tergantung pada sektor jasa. Namun dalam kasus Kupang, pekerjaan "kasar" tersedia lebih banyak daripada pekerjaan "kantoran".Profil ekonomi dan lapangan kerja menunjukkan bahwa pertumbuhan Kupang umumnya dipicu oleh konsumsi. Ekspor neto kota ini menunjukkan konsistensi negatif. Pada tahun 2017, misalnya, nilai ekspornya kurang dari seperempat nilai impor.[16] Meskipun kontribusi lapangan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan pemerintahan kecil, ekonomi yang berorientasi konsumsi digerakkan oleh belanja negara. Walaupun administrasi pemerintahan hanya menduduki urutan keempat dalam kontribusi PDB, hal ini menutupi fakta bahwa belanja negara mendorong banyak sektor ekonomi lain seperti konstruksi, pendidikan, dan pariwisata (yaitu rapat dan konferensi yang dibiayai negara), termasuk juga daya beli para

pegawai negeri. Data menunjukkan bahwa pada periode 2010-2016, belanja negara mencapai angka rata-rata 22,2 persen dari PDB Kupang.[17] Sebagai perbandingan, angka rata-rata pada periode yang sama di Indonesia adalah 9,4 persen.[18]

Kondisi bursa tenaga kerja yang buruk dikombinasikan dengan meningkatnya jumlah lulusan terdidik bisa menjelaskan turunnya partisipasi kerja beberapa tahun terakhir ini, khususnya untuk pekerja laki-laki

Oleh karena belanja negara di Kupang juga termasuk untuk lembaga pendidikan, tenaga kerja di Kupang umumnya memiliki pendidikan cukup tinggi; angka lulusan sarjana menjadi dua kali dari periode 2009 sampai 2016, mencapai 14 persen dari total angkatan kerja.[19] Angka ini lebih besar daripada kota lain di Indonesia dan rata-rata Indonesia secara keseluruhan, di mana hanya 6,5 persen dari tenaga kerja yang memiliki gelar sarjana. Meskipun demikian, sektor ekonomi formal di Kupang tetap kecil; sebagian besar pekerja masih bekerja di usaha kecil dan banyak di antaranya yang tidak memiliki perlindungan kerja. Pekerja mandiri mencakup sekitar seperlima jumlah angkatan kerja, dan angka ini jauh lebih besar untuk pekerja muda dan migran. Mereka yang bekerja sebagai buruh upahan biasanya tidak bekerja di perusahaan besar atau memiliki kontrak kerja; dari 1.700 perusahaan yang beroperasi di Kupang, hampir 70 persen hanya mempekerjakan antara 2 sampai 5 orang. Kondisi bursa tenaga kerja yang buruk dikombinasikan dengan meningkatnya jumlah lulusan terdidik bisa menjelaskan turunnya partisipasi kerja beberapa tahun terakhir ini, khususnya untuk pekerja laki-laki. Namun, ada satu perkembangan positif yaitu turun drastisnya angka pekerja yang tidak dibayar di Kupang antara tahun 2010 dan 2016, dari 5,3 persen menjadi 0,7 persen untuk laki-laki dan 15,9 persen menjadi 5,0 persen untuk perempuan.[20]

GEOGRAFI

Walaupun aktivitas ekonomi dan administratif pada mulanya berkembang di daerah Kota Lama – yang berada di ujung utara pantai kota – perluasan birokrasi dan populasi bergerak ke segala arah, tetapi khususnya ke arah timur (lihat **Peta 2**). Sekarang, meskipun Kota Lama tetap menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi, wilayah ini juga berpenduduk paling sedikit, dengan pertumbuhan terbesar terjadi di Kota Raja, Oebobo, dan Kelapa Lima. Wilayah Alak dan Maulafa adalah daerah yang berpenduduk paling jarang, yang lebih dilihat sebagai kawasan peri-urban, walaupun posisinya terletak pada pinggiran kota. (Lihat **Peta 3**.)

Beberapa pola dalam ekonomi ruang di Kupang patut dicermati. Beberapa universitas terbesar di Kupang terletak di Kelapa Lima dan dipadati oleh banyak mahasiswa, ditambah dengan banyak komunitas nelayan dan beberapa lokasi wisata. Banyak kantor-kantor pemerintahan terletak di Oebobo. Sementara itu aktivitas industri yang tidak begitu banyak di Kupang – termasuk perusahaan semen milik negara PT Semen yang terkenal terus merugi – terletak di Alak, termasuk juga pelabuhan Kupang beserta aktivitas logistik dan pergudangannya.

Peta 2

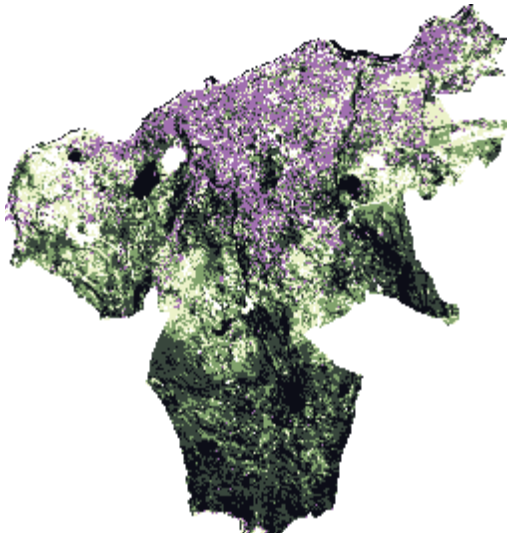
Ekspansi Perkotaan Kupang, 1995-2018



1995



2003

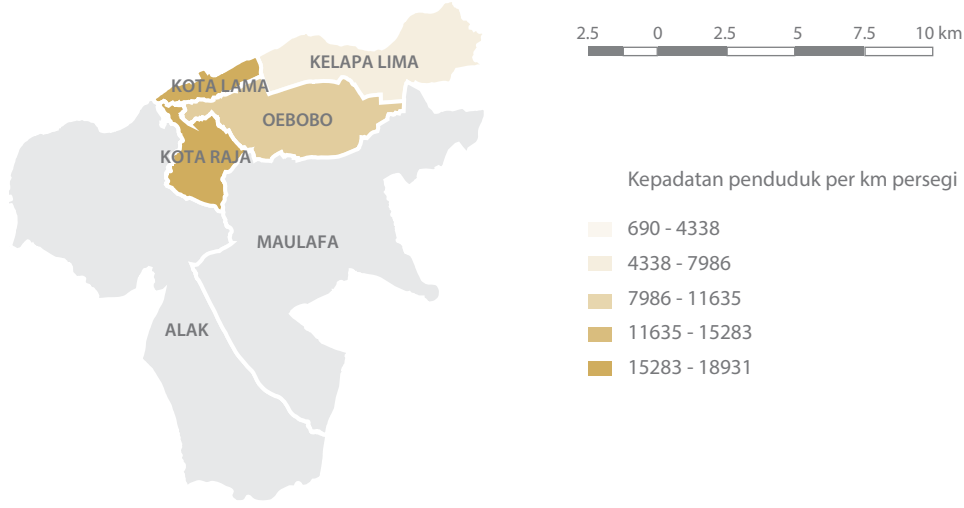


2018

Sumber: USGS EarthExplorer LANDSAT 5, LANDSAT, dan LANDSAT 8, analisis spektral menggunakan SAGA-GIS.

Peta 3

Kepadatan Penduduk Kecamatan (*Kecamatan)* Kupang, 2016



Sumber: Geospasial untuk Negeri dikombinasikan dengan data Kupang dalam Angka 2016 (BPS).

PEMERINTAHAN

Meskipun kehadiran birokrasi di Kupang sangat besar, terlihat dari peran besarnya dalam pertumbuhan kota, indikator pemerintahan menunjukkan cerita berbeda. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia di Kupang cukup tinggi, pemerintah kota Kupang mendapatkan Zona Kuning, atau peringkat menengah, dalam kesesuaian standar pelayanan publik pada tahun 2017, artinya mereka belum mampu meningkatkan pelayanan publik selama tiga tahun terakhir.[21] Beberapa lembaga pemerintahan setempat belum mampu memenuhi standar operasional minimum seperti yang ditentukan oleh perundang-undangan. Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menduduki peringkat keempat dari 30 provinsi untuk tingkat korupsi, berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW). Menurut ICW, terdapat 30 kasus korupsi di provinsi ini pada tahun 2015 saja, mengakibatkan kerugian negara sekitar 26,9 miliar (atau sekitar 2 miliar dolar).[22]

Kehadiran lembaga pemerintahan di Kupang, seperti halnya dengan pemerintahan kota lain di Indonesia, adalah kombinasi antara lembaga vertikal yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang bertanggung jawab pada walikota terpilih. Proses perencanaan pembangunan di tingkat kota di Indonesia terjadi di musrembang, atau musyawarah perencanaan pembangunan. Mengikuti musrembang pemerintah daerah Kupang, strategi pembangunan ekonomi Kupang diarahkan

untuk menggenjot pariwisata dan transportasi sebagai sektor pertumbuhan di kota ini. Oleh karena kaitannya yang erat dengan pariwisata, musrembang juga memprioritaskan ekonomi kreatif seperti kerajinan. Pemerintah kota juga berjanji untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah dan juga koperasi, misalnya dengan mempermudah izin usaha.

Migrasi, Kehidupan, dan Pekerjaan Sehari-hari di Kupang Temuan dari Data Primer

Pada tahun 2017 diadakan sebuah survei ekstensif terhadap 500 pekerja muda (usia 15-29) di Kupang disertai wawancara kualitatif mendalam dan diskusi kelompok terarah (FGD) bersama pekerja muda, pejabat pemerintah, pemilik usaha, dan organisasi masyarakat sipil. Bila digabungkan, data ini memberikan kilasan penting tentang siapa yang datang ke Kupang mencari kesempatan, apa yang mereka alami dalam bursa tenaga kerja, dan bagaimana relasi mereka dengan kota Kupang. Pada bagian ini kita akan melihat tiga hal tersebut sebelum mengidentifikasi titik temunya dan masalah-masalah penting bagi para pembuat keputusan mengenai peran positif apa yang bisa dimainkan kota Kupang dalam menciptakan kesempatan bagi generasi muda, khususnya para pekerja migran.

SIAPA YANG DATANG KE KUPANG?

Sebagian besar pekerja muda yang datang ke Kupang berasal dari kabupaten-kabupaten pedesaan di Nusa Tenggara Timur (93,9 persen), dan sisanya datang dari Pulau Jawa (3,8 persen). Dalam data, kami mendefinisikan pekerja muda migran sebagai orang yang berusia antara 15 sampai 29 tahun yang pindah ke Kupang dari tempat lain saat berusia 15 tahun atau lebih – yaitu mereka yang datang atas kemauan sendiri. Di antara orang yang kami survei, 87 persen pindah ke tempat lain untuk pertama kalinya, artinya mereka baru pertama kali pindah tempat tinggal sewaktu pindah ke Kupang. Di antara para migran dari NTT, jumlah yang paling besar datang dari kabupaten-kabupaten di Pulau Timor – yang bisa menjangkau Kupang lewat jalur darat – meskipun banyak juga yang datang dari wilayah NTT lain. Misalnya, 13,6 persen dari sampel pekerja muda yang datang ke Kupang berasal dari Rote dan 12,1 persen berasal dari Sawu, keduanya bisa dijangkau menggunakan kapal feri, kapal penumpang, atau pesawat terbang kecil.

Sementara tingkat pembangunan manusia di Kupang sejajar dengan wilayah Indonesia yang lebih sejahtera, kabupaten-kabupaten di sekitar Kupang asal para migran termasuk daerah yang paling miskin di Indonesia (lihat **Tabel 1** di atas). Kemiskinan ini disebabkan oleh faktor geografis

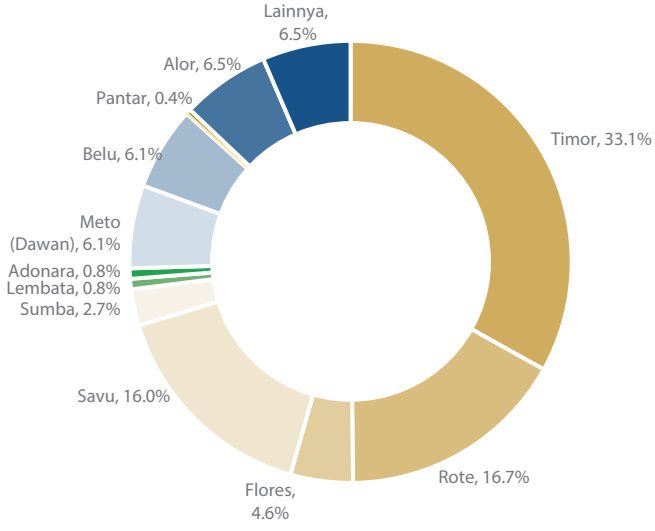
– pertanian kurang baik karena curah hujan yang relatif rendah dan tanah yang kurang produktif – ditambah dengan pemerintahan yang buruk. Pada sebagian besar masa kolonial dan sejarah Indonesia modern, ujung tenggara Nusantara ini diabaikan oleh pemerintahan di Jakarta. Seperti yang digambarkan di atas, penguasa yang silih berganti umumnya memanfaatkan pulau-pulau di NTT untuk mengeruk sumber daya ketimbang membangun infrastruktur atau industri di sana.

Meskipun berasal dari wilayah geografis yang terbatas – termasuk pulau-pulau dan kabupaten-kabupaten yang mengelilinginya – populasi migran di Kupang sangat beragam, mengingat banyak sekali kelompok etnis dan linguistik yang berada di provinsi NTT (lihat **Gambar 5**). Keragaman kota ini memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman para migran, yang digambarkan sebagai pengalaman yang menantang dan menjadi hal yang menarik untuk pindah ke Kupang.

Mengingat bahwa kabupaten-kabupaten pedesaan di NTT berpenduduk jarang dan kurang berkembang, pada migran umumnya datang dari daerah yang tidak memiliki banyak aktivitas ekonomi di luar pertanian. Dari sampel kami, 53,7 persen migran datang dari keluarga yang mata pencahariannya bertani – bandingkan dengan orang asli Kupang yang hanya 17,6 persen berasal dari keluarga petani. Banyak dari responden riset ini yang mengatakan bahwa mereka tertarik untuk bekerja di Kupang bukan karena ingin mendapatkan pekerjaan yang baik melainkan untuk mendapatkan kesempatan memperoleh

Gambar 5

Distribusi Pemuda (Umur 15-29) Migran di Kupang oleh Etnis, 2017



Sumber: Perhitungan sendiri berdasarkan data primer

uang tunai – mencerminkan kenyataan bahwa beberapa migran berasal dari daerah yang tidak berdasarkan ekonomi uang, karena rumah tangga pada umumnya mengandalkan pertanian subsisten.

Kupang menjadi tujuan pekerja migran laki-laki maupun perempuan, meskipun data menunjukkan lebih banyak laki-laki yang menjadi pekerja migran dibandingkan perempuan (lihat **Gambar 2** di atas). Baik migran laki-laki maupun perempuan umumnya belum menikah (78 persen), dan pekerja migran perempuan lebih banyak yang belum menikah dibandingkan laki-laki; 76,1 persen pekerja migran laki-laki belum menikah, sementara pada pekerja migran perempuan 81,3 persen. Wilayah NTT yang mengirimkan lebih banyak pekerja perempuan daripada laki-laki ke Kupang hanyalah Belu dan Flores Timur. Wawancara kualitatif menunjukkan bahwa kecenderungan besar pekerja migran perempuan dari daerah tersebut berkaitan dengan kurangnya kepemilikan lahan dan warisan oleh perempuan, artinya mereka mendapatkan lebih sedikit insentif untuk mengolah tanah milik keluarga.

Wawancara kualitatif menunjukkan bahwa kecenderungan besar pekerja migran perempuan dari daerah tersebut berkaitan dengan kurangnya kepemilikan lahan dan warisan oleh perempuan.

Kupang adalah tujuan utama migran untuk memperoleh pendidikan. Hampir sepertiga dari sampel kami mengatakan bahwa tujuan utama mereka datang ke Kupang adalah untuk memperoleh pendidikan dan mendapatkan kesempatan mengembangkan keahlian. Di Indonesia secara keseluruhan, sekitar setengah migran dari desa ke kota non-metropolitan datang ke kota untuk memperoleh pendidikan.[23]

Meskipun ada perbedaan kualitas pendidikan antara Kupang dan kabupaten asal para migran, tidak terdapat perbedaan mencolok antara tingkat pendidikan migran dan non-migran. Gender tampaknya juga menjadi faktor yang lebih penting dalam menentukan tingkat pendidikan seseorang. Sekitar 70 persen pekerja migran laki-laki dalam survei kami telah menyelesaikan pendidikan menengah atas, baik SMA maupun SMK. Pada pekerja migran perempuan, persentasenya menunjukkan angka yang lebih tinggi, yaitu di atas 85 persen. Ada satu perbedaan lagi antara pekerja migran dan non-migran, yaitu akses untuk sekolah kejuruan; pekerja non-migran lebih banyak yang memiliki ijazah SMK. Selain itu, pekerja perempuan non-migran lebih banyak yang lulus kuliah, yaitu sekitar seperempat memiliki ijazah S1. Angka ini lebih baik dari rata-rata Indonesia secara keseluruhan, di mana orang muda yang memiliki gelar sarjana mencapai sekitar 8,6 persen dan untuk perempuan 9,8 persen.

Namun, pencapaian angka pendidikan ini harus dilihat dari kacamata bursa tenaga kerja yang kurang memberi kesempatan bagi orang muda, sehingga menurunkan biaya peluang untuk melanjutkan pendidikan. Dari hasil survei, 11 persen mengatakan bahwa mereka membutuhkan lebih dari satu tahun untuk memperoleh pekerjaan di tempat mereka

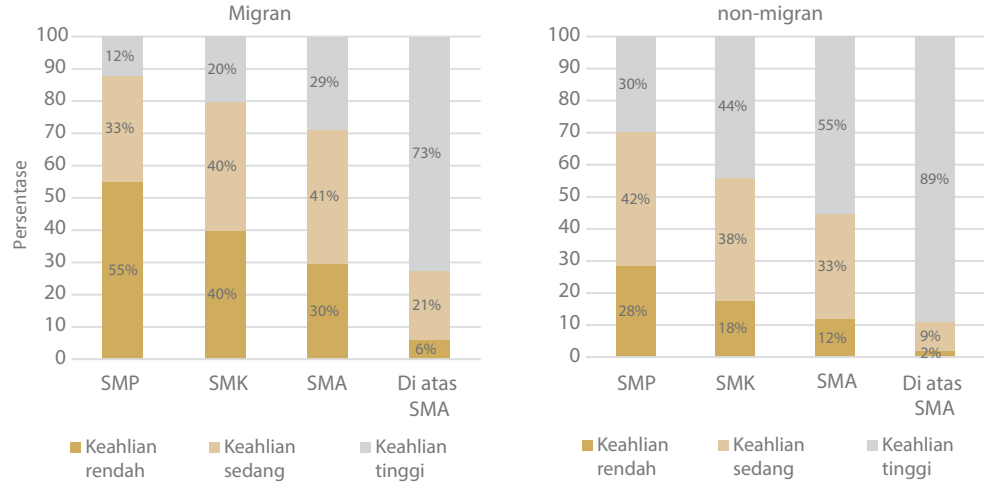
sekarang bekerja. Data sekunder menunjukkan bahwa angka pengangguran terdidik relatif tinggi di Kupang dan kabupaten lain di seluruh NTT. Misalnya di Belu – tempat asal 6 persen pekerja migran dalam sampel kami – hampir 40 persen orang muda adalah pengangguran terdidik. Di Rote dan Timor Tengah Selatan angkanya mencapai 21 persen dan 16 persen. Bahkan di Kupang, angka pengangguran terdidik di antara para migran mencapai 18 persen, mencerminkan fakta bahwa bursa tenaga kerja tidak memberikan jalan keluar bagi pengangguran.

BAGAIMANA PENGALAMAN PARA MIGRAN TENTANG BURSA TENAGA KERJA DI KUPANG?

Ketimpangan antar daerah di NTT antara Kupang dan kabupaten di sekitarnya termanifestasi dalam kesempatan kerja dan hasil ekonomi yang berbeda antara para migran dan orang asli Kupang. Meskipun mereka memiliki tingkat pendidikan yang relatif sama, para migran di Kupang lebih sering memperoleh pekerjaan tanpa perlindungan kerja dan bergaji rendah. Analisis regresi bahkan menunjukkan bahwa setelah mengontrol faktor pendidikan, gender dan faktor

Gambar 6

Probabilitas Mendapatkan Job oleh Keterampilan Kerja, Pemuda Migran vs. Non-Migran (Umur 15-29), 2017[iv]



Catatan: non-migran adalah orang yang sudah tinggal di Kupang sewaktu mereka mencapai usia kerja - yaitu umur 15 tahun

Sumber: Perhitungan sendiri berdasarkan data primer

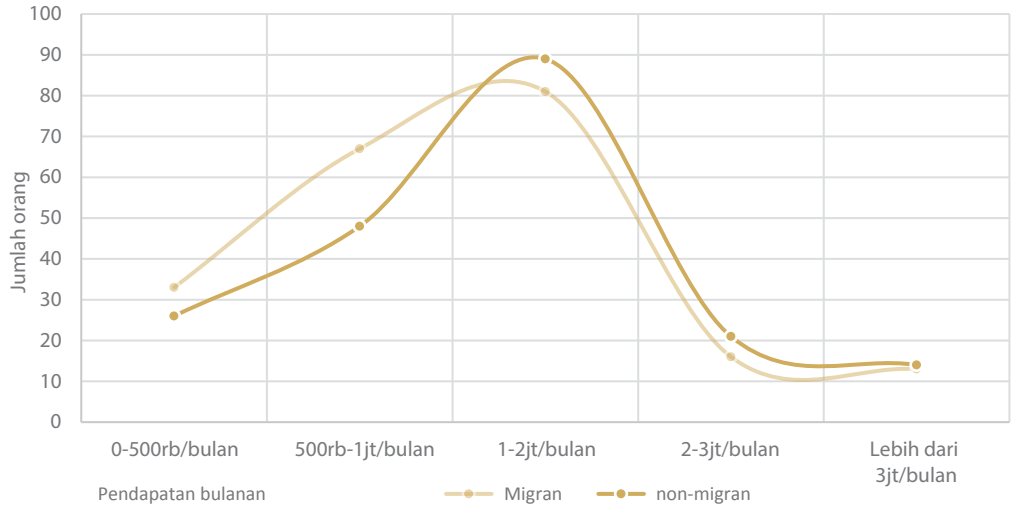
[iv] Pendekatan model regresi linier digunakan untuk memprediksi probabilitas pada margin tertentu. "Margin" adalah sebuah angka statistik yang dihitung dari prediksi model linier dengan memanipulasi nilai kovariat.

signifikan lain, status migrasi adalah determinan yang signifikan secara statistik terhadap tingkat keahlian pekerjaan seseorang; pekerja migran lebih mungkin mendapatkan pekerjaan yang membutuhkan tingkah keahlian rendah, seperti pekerja kasar atau rumah tangga (lihat **Gambar 6)**. Perbedaan ini bisa dikaitkan dengan beberapa faktor yang "tidak kelihatan" – seperti kualitas pendidikan, bias pemberi kerja, jaringan sosial, atau bahkan pengetahuan informal dan modal sosial karena seseorang dibesarkan dalam lingkungan perkotaan. Kendatipun demikian, perbedaan jenis pekerjaan tidak secara otomatis mengakibatkan perbedaan kapasitas pendapatan antara migran dan penduduk asli Kupang; distribusi pendapatan para pekerja muda migran hanya sedikit lebih rendah dari penduduk asli (lihat **Gambar 7**) – menunjukkan terbatasnya jumlah pekerjaan berkualitas dan bergaji tinggi di bursa tenaga kerja Kupang bahkan bagi orang mereka yang diuntungkan.

Para pekerja migran laki-laki cenderung menjadi buruh harian yang tidak membutuhkan keahlian tertentu selain kesediaan untuk melakukan pekerjaan kasar. Beberapa responden dalam diskusi kelompok terarah mengatakan hal seperti ini, "jika kamu tidak malu, kamu bisa mendapatkan pekerjaan apa pun di Kupang." Misalnya, sebagian besar buruh pelabuhan yang membawa barang dari kapal ke kendaraan adalah para migran dari Pulau Timor. Lebih dari sepertiga migran laki-laki melakukan pekerjaan rendahan seperti ini. Pekerja migran perempuan biasanya bekerja di toko; sekitar 40 persen bekerja di usaha

Gambar 7

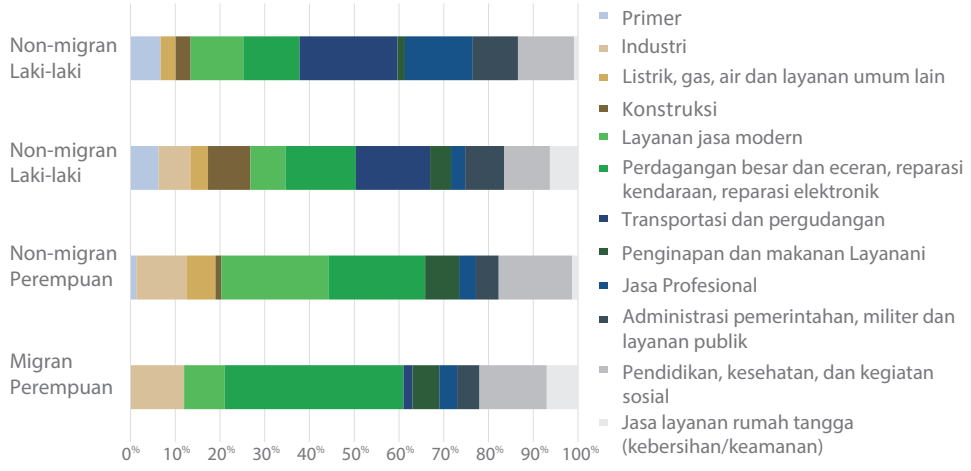
Distribusi Pendapatan Pemuda Migran dan Non-Migran (Umur 15-29) di Kupang, 2017



Sumber: Perhitungan sendiri berdasarkan data primer

Gambar 8

Sektor Perkerjaan menurut Jenis Kelamin dan Status Migrasi pemuda (Umur 15-29), 2017

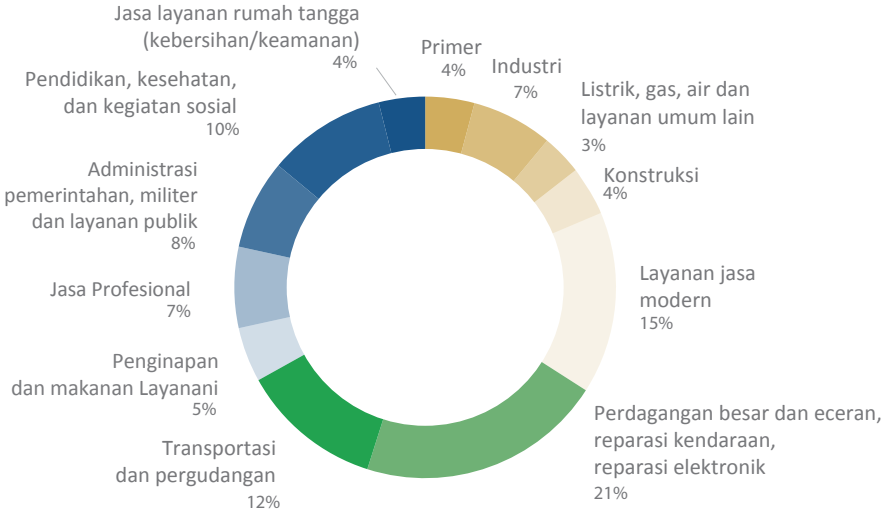


Catatan: Layanan jasa modern meliputi: Informasi dan komunikasi; Keuangan dan asuransi; Jasa properti; Seni, hiburan, dan rekreasi

Sumber: Perhitungan sendiri berdasarkan data primer

Gambar 9

Sektor Pekerjaan di Kalangan Pekerja Muda (Umur 15-29), 2017



Catatan: Layanan jasa modern meliputi: Informasi dan komunikasi; Keuangan dan asuransi; Jasa properti; Seni, hiburan, dan rekreasi

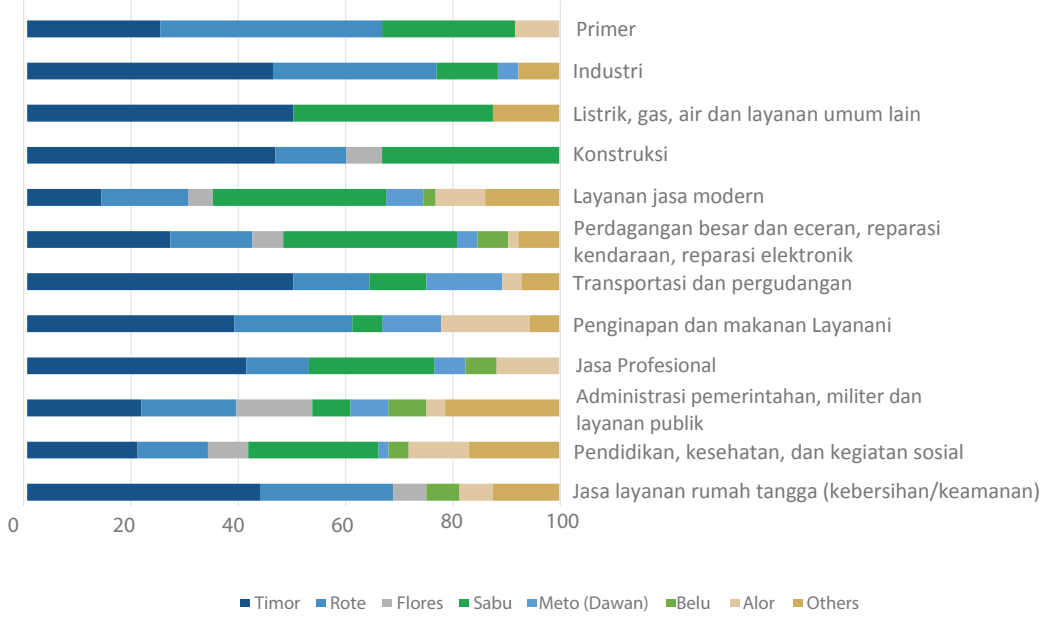
Sumber: Perhitungan sendiri berdasarkan data primer

perdagangan grosir dan eceran, sebagian besar dari mereka menyebutkan mereka bekerja pada sektor "jasa dan perdagangan." Pekerjaan yang membutuhkan keahlian tinggi dalam sektor jasa formal dan administratif biasanya diisi oleh penduduk asli Kupang, bersama dengan sejumlah kecil pendatang dari Jawa (lihat **Gambar 8-9**).

Beberapa indikator kualitas pekerjaan menunjukkan posisi termarginalkan para pekerja migran. Jika faktor lain yang relevan dikontrol, kemungkinan pekerja migran untuk mendapatkan kontrak kerja dari pemberi kerja lebih kecil dibandingkan dengan pekerja non-migran. Misalnya, pekerja migran, baik laki-laki maupun perempuan, lebih besar kemungkinan punya catatan kecelakaan kerja sampai dua kali lipat. Meskipun jumlahnya kecil secara absolut, semua dari mereka yang mengatakan pernah mengalami kekerasan fisik di tempat kerja – baik dari rekan kerja maupun atasan – adalah pekerja migran. Namun, kurangnya perlindungan kerja memberikan dampak yang berbeda bagi pekerja migran laki-laki dan perempuan. Laki-laki sering kali menggantungkan pada pekerjaan kasar serta menjadi buruh harian serta sering mengalami kondisi setengah menganggur.

Gambar 10

Pekerjaan menurut Sektor dan Etnis Pekerja Muda (Umur 15-29) di Kupang, 2017



Catatan: Layanan jasa modern meliputi: Informasi dan komunikasi; Keuangan dan asuransi; Jasa properti; Seni, hiburan, dan rekreasi

Sumber: Perhitungan sendiri berdasarkan data primer

Beberapa responden mengatakan mereka sering melewatkan makan karena pendapatannya kurang. Meskipun demikian, kurangnya jaminan bagi pekerja migran laki-laki yang disebabkan kurangnya ikatan dengan satu pemberi kerja tetap juga melahirkan fleksibilitas dan menumbuhkan persepsi bagi para laki-laki bahwa kota adalah sebuah tempat untuk mendapatkan kebebasan dan paparan sosial.

Sebaliknya, banyak pekerja migran perempuan, khususnya perempuan muda, bekerja di toko yang memberikan perlindungan kerja lebih baik namun membatasi mobilitas karena mereka diharapkan bekerja dalam waktu yang panjang tanpa kompensasi tambahan. Berdasarkan survei kami, pekerja migran perempuan adalah kelompok yang paling mungkin mendapatkan makan (50 persen) dan tempat tinggal (20 persen) dari pemberi kerja tetapi lebih kecil kemungkinan mendapatkan upah lembur (35 persen), jika dibandingkan dengan pekerja non-migran dan pekerja migran laki-laki. Dalam perjanjian kerja di mana pekerja migran perempuan mendapatkan makan dan tempat tinggal, beberapa tidak menerima gaji sama sekali; hampir 12 persen perempuan di dalam sampel menyebutkan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan gaji, 90 persen dari mereka adalah pekerja migran yang berasal dari Sawu dan berusia di bawah 20 tahun.

Status migrasi bukan satu-satunya penentu jenis pekerjaan bagi pekerja muda; etnisitas juga memainkan peran penting. Pekerja migran dari Timor – yang umumnya berasal dari kabupaten-kabupaten di pulau yang sama dengan Kupang – lebih besar kemungkinannya menjadi pekerja serabutan di sektor transportasi dan pergudangan. Sementara itu pekerja migran perempuan dari Sawu kemungkinan besar bekerja di toko. Rincian berdasarkan sektor pekerjaan dan etnis di Kupang dapat dilihat di **Gambar 10.** Pentingnya jaringan – baik berdasarkan etnis atau yang lain – juga tergambarkan dalam cara para pekerja muda memperoleh pekerjaan. Tidak seorang pun dari hasil survei yang mengatakan bahwa ia memperoleh pekerjaan dari agen tenaga kerja; hampir semuanya mengatakan bahwa mereka mendapatkan pekerjaan melalui keluarga atau teman. Baik bagi migran atau non-migran, laki-laki maupun perempuan, orang Timor atau Rote, Kupang menawarkan hanya sedikit lembaga yang bisa membantu kaum muda menghadapi kesulitan dalam mengarungi bursa tenaga kerja.

Baik bagi migran atau non-migran, laki-laki maupun perempuan, orang Timor atau Rote, Kupang menawarkan hanya sedikit lembaga yang bisa membantu kaum muda menghadapi kesulitan dalam mengarungi bursa tenaga kerja.

Hanya 3 persen dari pekerja yang disurvei mengatakan bahwa mereka adalah anggota dari sebuah organisasi atau serikat pekerja. Dari sedikit responden yang menjadi anggota organisasi, mereka mengatakan bahwa serikat kerja hanya memberikan sedikit informasi serta kadang-kadang manfaat langsung, misalnya pemeriksaan kesehatan, sehingga serikat pekerja lebih berfungsi seperti sebuah yayasan nirlaba ketimbang menjadi kendaraan untuk memperbaiki kondisi kerja atau upah.

BAGAIMANA PARA MIGRAN MENGAITKAN DIRINYA DENGAN KOTA?

Meskipun para migran menghadapi kesulitan di dalam bursa tenaga kerja di Kupang, bukti menunjukkan bahwa mereka umumnya berhasil mengintegrasikan diri dengan kota, seraya menghadapi kesulitan dalam pekerjaan mereka. Dari sekian banyak faktor yang menjadi alat akses dan integrasi, yang dialami para migran tidak jauh berbeda dengan para non-migran. Misalnya, 72 persen pekerja migran perempuan menggunakan pusat kesehatan yang disediakan pemerintah – baik rumah sakit maupun puskesmas – untuk memperoleh layanan kesehatan. Delapan puluh dua persen pekerja non-migran perempuan juga bergantung pada fasilitas kesehatan milik pemerintah ini. Perbedaan antara pekerja laki-laki migran dan non-migran bahkan lebih kecil, 65,3 persen berbanding dengan 75,3 persen. Pekerja migran lebih besar kemungkinan menggunakan transportasi umum dibandingkan dengan non-migran; pada laki-laki dua kali lipat (20,4 persen berbanding 12,1 persen), dan untuk perempuan 48,5 persen berbanding 32,4 persen. Angka kepemilikan rekening bank juga tidak menunjukkan perbedaan signifikan antara migran dan non-migran, meskipun pekerja perempuan umumnya lebih besar kemungkinan memiliki rekening bank.

Latar belakang etnis yang dibawa para migran ke Kupang dibentuk, diperkuat, dan diperkaya oleh pengalaman mereka di kota ini. Para pemuda menyebut diri mereka satu sama lain sebagai 'orang Rote' atau 'orang Timor' ; identitas ini tidak hanya memberikan rasa kebersamaan satu komunitas melainkan juga secara kolektif membedakan mereka dari 'orang Kupang', sebagai orang yang dilahirkan dan dibesarkan di kota dan teridentifikasi secara geografis alih-alih secara etnis. Banyak migran menyoroti pengalaman mereka datang ke kota dan bertemu orang dari beragam etnis yang menggunakan bahasa berbeda. Beberapa mengatakan bahwa hal ini adalah sebuah tantangan, yang bisa mengarah pada salah pengertian atau bahkan konflik, namun sebagian besar melihatnya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari dan sebagai aspek positif dari tinggal di Kupang.

Latar belakang etnis seseorang membawa jaringan tertentu yang penting dalam membentuk relasi para migran terhadap kota dan ekonominya.

Meskipun demikian, cukup jelas bahwa latar belakang etnis seseorang membawa jaringan tertentu yang penting dalam membentuk relasi para migran terhadap kota dan ekonominya. Jaringan keluarga dan kekerabatan ini membentuk semacam jaring pengaman bagi para migran muda di Kupang. Beberapa orang muda mengatakan bahwa mereka pernah menganggur selama enam bulan sampai dua tahun; pada masa itu mereka sangat bergantung pada jaringan keluarga besar untuk mendapatkan makan dan tempat tinggal. Jaringan ini juga menyediakan koneksi ke bursa tenaga kerja. Untuk membantu menjelaskan hal ini, seperti yang ditunjukkan **Gambar 10** di atas, beberapa kelompok etnis tertentu kurang atau lebih terwakili pada beberapa pekerjaan tertentu. Jaringan ini bisa dilihat sebagai sesuatu yang positif, untuk memberikan jaring pengaman dan informasi

bursa tenaga kerja, tetapi bisa juga menjadi faktor negatif. Stereotip terhadap kelompok etnis tertentu cukup mengikat, artinya beberapa pekerja migran muda terkungkung pada segmen pekerjaan tertentu di bursa tenaga kerja.

Jenis kelamin juga memainkan peran penting dalam memengaruhi relasi seorang migran dengan kota. Seperti yang dijelaskan di atas, laki-laki dan perempuan menghadapi kerentanan perlindungan kerja yang berbeda. Tingginya tingkat kebebasan dan fleksibilitas bagi pekerja migran laki-laki membuat mereka menggambarkan Kupang sebagai sebuah tempat bertualang dan berhura-hura, tempat bersosialisasi, membangun relasi pertemanan baru, dan mengeksplorasi "kota yang memiliki segalanya" – seperti yang dikatakan oleh seorang responden. Perempuan umumnya tidak menggambarkan pengalaman mereka di Kupang seperti ini, karena kemungkinan besar mereka tidak begitu bebas dalam lingkungan kerja atau tempat tinggal.

Para migran di dalam survei kami sangat mungkin menggambarkan Kupang sebagai rumah mereka. Ketika ditanyakan mengenai bagaimana mereka memaknai "rumah," 85,8 persen laki-laki dan 84,5 persen perempuan mengatakan "tempat saya tinggal" – atau dengan kata lain, Kupang – dikontraskan dengan "tempat saya dilahirkan" atau "tempat tinggal keluarga saya." Angka ini cukup tinggi dibandingkan angka lain dalam survei kami, di tempat di mana kondisi pekerjaan lebih baik dan perbedaan etnis antara migran dan non-migran kurang kentara.

Mengapa, di tengah kesulitan yang mereka hadapi di Kupang, para migran ini bisa merasa memiliki? Ada beberapa faktor yang mungkin bermain di sini. Tingkat akses layanan publik yang relatif tinggi dan tersedianya jaringan keluarga dan kekerabatan mungkin membantu membentuk rasa memiliki di Kupang. Sebaliknya, mungkin rasa puas yang muncul setelah berhasil mengatasi hambatan dan kesulitan hidup di kota, baik secara kultural maupun ekonomi, menciptakan semacam rasa telah mencapai sesuatu di perantauan. Pada akhirnya, kondisi geografis NTT dan terpencilnya kampung asal banyak pekerja migran membuat mereka sulit pulang ke tempat asalnya (sekitar seperempat migran pulang ke tempat asal kurang dari sekali setahun), sehingga memaksa mereka untuk membangun ikatan dengan Kupang.

Tantangan-Tantangan Utama di Kupang untuk Menciptakan Bursa Tenaga Kerja yang Inklusif

Oleh karena Kupang mengalami lonjakan populasi akibat migrasi dari wilayah pedesaan Nusa Tenggara Timur dan pertumbuhan pesat ekonomi yang dipicu investasi infrastruktur oleh pemerintah Indonesia, Kupang menghadapi beberapa tantangan dalam menciptakan sebuah kota dan bursa tenaga kerja untuk memastikan kemakmuran yang baru didapatkan ini bisa dibagikan dan berkelanjutan. Pada bagian ini, kami akan menggarisbawahi tantangan-tantangan sebelum merekomendasikan pendekatan tertentu untuk menanggulanginya.

PUSAT KEMAKMURAN ATAU ATAU PUSAT KETIDAKPASTIAN ?

Kupang berdiri di tengah perbedaan tajam antara kelas menengah Indonesia yang tumbuh subur dengan bagian lain Indonesia yang ditandai dengan kemiskinan, kekurangan, yang terus-menerus berjuang untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan. Kedua hal ini saling berkelindan dalam bursa tenaga kerja. Di satu pihak, para migran dari desa melihat Kupang sebagai "kota yang memiliki segalanya" – seperti yang digambarkan salah satu responden dalam survei kualitatif kami – tempat mendapatkan pekerjaan yang, paling tidak, bisa mendatangkan uang, dan kesempatan untuk belajar dan naik kelas. Di pihak lain, bursa tenaga kerja Kupang pada umumnya menawarkan pekerjaan informal dan tanpa perlindungan kerja. Arus modal dari pembangunan infrastruktur dan tumbuhnya sektor perhotelan tidak banyak menciptakan lapangan kerja yang terjamin dan bergaji tinggi, dan upah minimum regional Kupang pada umumnya tidak ditegakkan. Pemerintah pusat di Jakarta melihat Kupang sebagai tonggak pertumbuhan dan kesempatan di Indonesia Timur, tetapi kenyataan di Kupang memperlihatkan wajah yang berbeda. Masa depannya tergantung pada kemampuan berevolusi melampaui ekonomi yang bertumbuh karena investasi belanja negara dengan remah-remah kemakmuran yang jatuh dalam bentuk banyaknya lapangan kerja informal.

Bursa tenaga kerja di Kupang gagal menggali potensi produktif para migran yang datang dari pelosok Nusa Tenggara Timur. Meskipun memiliki tingkat pendidikan yang setara dengan tenaga kerja dari Kupang, orang-orang muda yang datang mencari kesempatan dari tempat jauh kemungkinan besar mendapatkan pekerjaan rendahan.

POTENSI MIGRAN DAN KAUM MUDA YANG BELUM TERGALI

Dalam kondisinya saat ini, bursa tenaga kerja di Kupang gagal menggali potensi produktif para migran yang datang dari pelosok Nusa Tenggara Timur. Meskipun memiliki tingkat pendidikan yang setara dengan tenaga kerja dari Kupang,

orang-orang muda yang datang mencari kesempatan dari tempat jauh kemungkinan besar mendapatkan pekerjaan rendahan. Dalam survei kami, 47,6 persen pekerja migran memperoleh pendapatan kurang dari satu juta rupiah (US$70) per bulan.

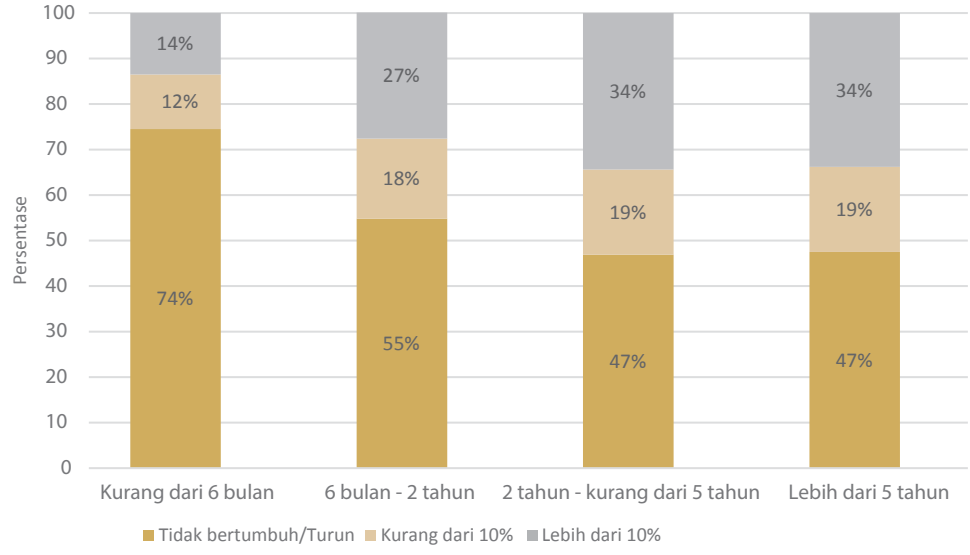
Seorang migran berijazah sarjana mempunyai kesempatan yang kurang lebih sama (65 persen) memiliki pekerjaan yang sama dengan orang Kupang yang hanya berpendidikan SMA (lihat **Gambar 6** di atas). Selain itu, pemberi kerja tidak berinvestasi pada pekerja, khususnya para pekerja migran. Meskipun persentase pekerja muda asal Kupang yang menerima pelatihan cukup rendah (27,8 persen), angkanya masih lebih tinggi dari persentase pekerja migran (25,4 persen).

Rendahnya pengembalian atas pendidikan paling tampak pada para migran, meskipun pekerja asli Kupang juga bergelut pada masalah yang sama. Dengan mengontrol faktor lain yang relevan, pekerja muda di Kupang yang berijazah sarjana, baik migran atau non-migran, berpeluang 47 persen memperoleh pertumbuhan pendapatan nol atau negatif bahkan setelah bekerja selama 2-5 tahun. (Lihat **Gambar 11**.)

Bahkan semakin rendah pendidikan seseorang di Kupang, peluangnya mendapatkan kenaikan pendapatan semakin besar. Meskipun hal ini bisa dipandang secara positif, bahwa Kupang memberikan mobilitas pendapatan bagi mereka yang berpendidikan rendah, kita harus melihat ini dalam konteks berkembangnya aspirasi

Gambar 11

Probabilitas Pertumbuhan yang Berbeda untuk Tingkat Pendapatan pada Pekerjaan Saat Ini untuk Lulusan Sarjana di Kupang, Berdasarkan Lama Pengalaman Kerja, 2017



Sumber: Perhitungan sendiri berdasarkan data primer

generasi muda yang banyak pindah ke Kupang *untuk* mendapatkan pendidikan. Tren nasional di Indonesia menunjukkan lebih besar terjadi kemungkinan migrasi keluar generasi muda berkeahlian dari kota kecil dibandingkan dari kota besar metropolitan,[24] Hal ini menandakan bahwa pekerjaan dengan keahlian tinggi masih terpusat di kota-kota besar. Kupang harus memilih jalannya sendiri, dengan menciptakan beragam pekerjaan bagi kaum muda dengan berbagai tingkat pendidikan untuk memastikan prospek mobilitas karier, pengembangan keahlian, dan pertambahan pendapatan. Bila tidak, jumlah populasi muda terdidik yang meningkat akan semakin frustrasi menghadapi kenyataan yang ditawarkan oleh kota Kupang.

KETIDAKCOCOKAN ANTARA HARAPAN PENCARI KERJA DAN PEMBERI KERJA

Salah satu gesekan besar dalam bursa tenaga kerja di Kupang – dan kendala serius untuk menciptakan iklim bisnis lokal yang lebih kuat – adalah ketidakcocokan antara aspirasi dan harapan pencari pekerja dengan kesempatan serta lingkungan pekerjaan yang ditawarkan pemberi kerja. Ketidakcocokan ini berakar dari lingkaran setan: pencari kerja menganggap pekerjanya kurang disiplin sehingga tidak mau berinvestasi untuk melatih atau membuat sistem manajemen sumber daya manusia yang efektif. Selain itu, mereka juga tidak memberikan kondisi pekerjaan yang baik, misalnya membayar upah minimum atau memberikan kontrak kerja. Pekerja, di lain pihak, tidak merasa dihargai oleh pemberi kerja – dalam penelitian kualitatif banyak yang mengatakan sering dimarahi – dan oleh karena itu menunjukkan perilaku yang mengekalkan stereotip tidak disiplin. Misalnya, baik pekerja maupun pemberi kerja mengatakan bahwa "kabur" dari pekerjaan adalah praktik yang biasa; ketimbang mengundurkan diri secara resmi, seorang pekerja bisa saja langsung tidak datang. Ini, tentu saja, mencerminkan sifat informal dari bursa tenaga kerja, tetapi juga mengungkapkan rumitnya tantangan yang dihadapi pembuat kebijakan jika mereka ingin memberikan insentif untuk pendirian perusahaan secara formal.

Meningkatkan kepercayaan antara pemberi kerja dan pekerja bisa memajukan sektor swasta lokal di Kupang.

Tantangan "ketidakcocokan" ini lebih besar bagi para migran, yang menghadapi hambatan besar setelah pindah dari ekonomi pedesaan yang hampir tidak menggunakan uang ke bursa tenaga kerja modern, dengan segala implikasi kultural dan finansialnya. Menonjolnya ketimpangan ini dalam budaya kerja menyebabkan banyak pekerja migran berpindah-pindah tempat kerja, antara bekerja sebagai pekerja yang menerima upah tetap atau per jam dan bekerja mandiri, di mana mereka sendirilah yang menjadi majikannya.

Meskipun masalah ini sulit diatasi, meningkatkan kepercayaan antara pemberi kerja dan pekerja bisa memajukan sektor swasta lokal di Kupang. Tampaknya baik perusahaan besar dengan manajemen sumber daya manusia tertata maupun perusahaan kecil belum bisa menjawab tantangan ini. Di satu sisi, dari penelitian kualitatif ini, perusahaan besar lebih tidak bermasalah dalam kasus keluar masuknya pekerja dan kedisiplinan. Di sisi lain, hasil analisis regresi

dari data primer menunjukkan bahwa tingkat kepuasan kerja di antara pekerja perusahaan besar lebih rendah, setelah mengontrol faktor lain yang relevan.

SUMBER DAYA PUBLIK YANG TERFRAGMENTASI

Otoritas provinsi – baik perwakilan dari kementerian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah – menyadari pentingnya dukungan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengembangan keahlian di tingkat lokal. Namun, sudut pandang kebijakan saat ini adalah membagi sumber daya publik menjadi paling tidak belasan program berbeda yang diatur oleh banyak lembaga negara. Fragmentasi sumber daya dari pemerintah yang berbagi tujuan dalam mendukung bursa tenaga kerja lokal memiliki tiga konsekuensi negatif yang perlu dicermati. Pertama, sebagian besar program-program tersebut kecil dan kekurangan dana.

Hampir semua pejabat pemerintah yang diwawancarai pada waktu pengambilan data kualitatif mengeluh bahwa program yang mereka coba jalankan kekurangan sumber daya untuk bisa sukses. Misalnya, program pelatihan oleh Dinas Perdagangan dan Industri hanya menerima 20 orang per tahun, dan program untuk mendukung wirausahawan lokal oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, dengan total anggaran hanya 5 juta rupiah (US$350), hanya bisa mengakomodasi 10 sampai 20 orang. Program-program kecil seperti ini sulit untuk menjawab tantangan besar bursa tenaga kerja yang dihadapi Kupang, dengan laju migrasi yang sudah membengkakkan populasi orang muda lebih dari 11 persen antara tahun 2011 sampai 2015.[25] Kedua, program-program yang diimplementasikan di Kupang dan sekitarnya tidak terkoordinasi dengan baik dengan tujuan yang selaras. Misalnya, lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan ekonomi, Bappeda, membayangkan Kupang sebagai sebuah pusat pariwisata, tetapi di luar sebuah program pelatihan dari Dinas Ketenagakerjaan yang berfokus pada perhotelan, tidak ada usaha lintas departemen yang jelas dan terkoordinasi untuk mendukung pengembangan keahlian yang mendukung pariwisata atau kewirausahaan.

Konsekuensi terakhir dari fragmentasi sumber daya publik adalah pemerintahan Kupang yang dipandang masih tidak efektif. Hampir semua hasil wawancara dalam penelitian kualitatif yang mewakili lembaga non-pemerintah – baik dari sektor swasta atau masyarakat sipil – menganggap bekerja sama dengan pemerintah kurang efektif. Selain itu, banyak pihak kurang percaya bahwa pemerintah melibatkan diri secara signifikan untuk mengatasi tantangan penciptaan lapangan kerja di Kupang. Masalahnya bukan sekadar persoalan humas dari pemerintah daerah. Pengalaman dari berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa hidupnya ekonomi setempat tergantung dari kerja sama yang kokoh antara sektor swasta, masyarakat sipil, dan pemerintah. Entah kerja sama dengan pemerintah dipandang efektif atau tidak saat ini di Kupang, namun pembangunan ekonomi lokal yang sukses dan inklusif sulit terjadi tanpa kehadiran kerja sama semua pihak.

Rekomendasi Kebijakan

Seperti yang telah ditunjukkan dalam investigasi primer, Kupang menghadapi tantangan mendesak untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas pekerjaan dalam bursa tenaga kerja lokal. Saat ini, sebagian besar orang muda berjuang untuk mendapatkan kesempatan kerja yang bisa memberikan prospek mobilitas sosial lebih baik beserta jaminan dan hak-hak dasar. Kupang mempunyai peluang untuk menggali potensi-potensi produktif dari populasinya yang muda, baik dari orang asli Kupang maupun pendatang dari daerah yang lebih miskin di Nusa Tenggara Timur. Untuk melakukan hal itu, investasi pemerintah dalam bentuk infrastruktur dan lembaga pendidikan harus termanifestasi dalam ekonomi lokal yang inklusif dan menciptakan banyak lapangan kerja. Seperti yang akan ditunjukkan rekomendasi di bawah ini, penanganan dari tantangan ini akan membutuhkan pemikiran melampaui batas kota Kupang, menguatkan ikatan desa-kota antara Kupang dan daerah sekitarnya serta membina sektor pertumbuhan yang belum tergali di kota Kupang.

Rekomendasi di bawah ini bertujuan mencapai tiga hal berikut: 1) Menambah lapangan kerja yang tersedia bagi generasi muda di Kupang, termasuk untuk para pendatang; 2) Meningkatkan kualitas pekerjaan di Kupang, khususnya bagi generasi muda di sektor informal; dan 3) Meningkatkan keahlian, kelayakan kerja, dan akses bursa tenaga kerja bagi generasi muda.

1. MENGUATKAN IKATAN DESA-KOTA UNTUK MENJADIKAN KUPANG SEBAGAI SENTRA PENGOLAHAN PERTANIAN DI INDONESIA TIMUR

Mengingat model pertumbuhan Kupang saat ini yang terbatas pada konsumsi, kota ini harus menemukan cara mendukung sektor berorientasi produksi seperti perindustrian. Oleh karena kepadatan penduduk yang rendah dan jarak geografis dari pusat kota utama, Nusa Tenggara Timur sulit bersaing untuk industri seperti tekstil. Namun, proses pengolahan hasil pertanian bisa menjadi salah satu sektor industri yang bisa dikembangkan di Kupang, khususnya untuk ceruk produk yang bahan bakunya berasal dari provinsi ini.

Di saat pemerintah pusat sedang menggalakkan usaha milik desa di seluruh Indonesia – untuk mencari aktivitas ekonomi bernilai tambah di pedesaan – strategi yang melibatkan pendirian fasilitas industri di desa sulit untuk berhasil, karena ukuran desa yang cenderung kecil dan terisolasi serta hasil pertanian yang tidak sebanyak pulau lain seperti Jawa. Untuk mengembangkan sektor pengolahan hasil pertanian yang kompetitif, hasil pertanian harus dikumpulkan kemudian baru diolah. Kupang memiliki letak yang paling strategis untuk hal ini, mengingat ikatannya dengan kabupaten pelosok di seluruh provinsi serta hubungan secara nasional dan internasional melalui jalur laut maupun udara.

Strategi pengembangan ekonomi yang dibangun di sekitar pengolahan hasil pertanian membutuhkan koordinasi antara pemerintah kota Kupang, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur, dan pemerintah daerah di kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Dengan melihat potensi pengembangan pedesaan – dari meningkatnya permintaan hasil pertanian – usaha milik desa bisa diajak untuk mengumpulkan hasil mereka dan memberikan sejumlah modal yang dibutuhkan untuk membangun industri pengolahan hasil pertanian di Kupang, khususnya bila ada peningkatan dana desa dari pemerintah pusat. Langkah ini akan menjadi sebuah strategi jangka panjang yang efektif bagi pemerintah desa: dengan kepemilikan bersama fasilitas industri pengolahan pertanian mereka bisa memastikan produk petani mereka dijual dengan harga yang adil.

Kupang bisa membangun keunggulan kompetitif dengan industri pengolahan pertanian untuk beberapa produk seperti madu, tekstil, asam, dan gula lontar. Pada mulanya mungkin hasil produksinya cukup kecil, untuk memasok kebutuhan Kupang dan beberapa kota lain di Indonesia timur. Namun, jika sektor ini mendapat iklim kebijakan yang mendukung dan jika koordinasi antara pemerintah desa dan kota di seluruh provinsi berjalan efektif, sektor industri pengolahan pertanian pada akhirnya bisa melayani pasar domestik yang lebih besar seperti Jawa dan Bali atau bahkan sampai pasar internasional.

2. MENINGKATKAN JANGKAUAN BAGI WIRAUSAHAWAN LOKAL DALAM SEKTOR PARIWISATA YANG SEDANG BERKEMBANG

Sektor pariwisata adalah satu prioritas pembangunan ekonomi pemerintah daerah Kupang. Namun, pemerintah daerah sejauh ini umumnya melihat Kupang sebagai sebuah "kota transit" ketimbang sebuah tujuan wisata. Sebagian besar usaha meningkatkan pariwisata umumnya berkutat pada menarik jaringan hotel besar alih-alih menciptakan sebuah pengalaman unik yang bisa menarik turis. Kupang seharusnya melebarkan visinya dalam sektor pariwisata dan membuka jalan bagi para wirausahawan setempat untuk memetik hasil dari sektor ini.

Kupang seharusnya melebarkan visinya dalam sektor pariwisata dan membuka jalan bagi para wirausahawan setempat untuk memetik hasil dari sektor ini.

Dengan memasarkan diri sebagai sebuah pusat keragaman sekaligus gerbang kosmopolitan Indonesia Timur, Kupang bisa memanfaatkan keragaman etnis dan bahasa di Nusa Tenggara Timur yang mewakili daerah di sekitarnya. Strategi wisata kota bisa berpusat pada perayaan keragaman ini. Misalnya, para turis domestik maupun internasional bisa merasakan uniknya budaya Flores, Alor, dan Belu dalam sebuah perjalanan tiga atau empat hari sambil tinggal di *homestay*, ikut kursus memasak dan bahasa, serta belajar mengenai cerita rakyat setempat.

Strategi "*bottom-up*" seperti ini bisa mencapai beberapa tujuan: pertama, membuka kesempatan bagi wirausahawan setempat ketimbang hotel besar yang biasanya didanai dan dikelola oleh perusahaan yang berbasis di Jawa dan Bali. Kedua, menciptakan kesempatan kerja bagi pekerja dari kabupaten dan pulau-pulau di sekitar Kupang. Ketiga, menumbuhkan kebanggaan warga akan keragaman Kupang.

Masih ada cara lain untuk memastikan pertumbuhan sektor pariwisata dan perhotelan di Kupang agar bisa melayani populasi yang lebih luas selain apa yang sudah dilakukan secara langsung oleh hotel-hotel baru. Pemerintah daerah bisa memberikan insentif kepada jaringan-jaringan hotel di Kupang yang mau menggunakan bahan lokal.

Misalnya, hotel yang membeli barang minimal sekian persen (makanan, minuman, tekstil, bahan bangunan, dll.) dari produsen lokal bisa mendapatkan potongan pajak dari pemerintah daerah. Hal ini akan mendorong jaringan hotel untuk mempertimbangkan pembelian dari rantai pasokan lokal ketimbang dari pemasok berskala nasional dari tempat lain, dan dapat memberikan efek menumbuhkan produksi yang berbasis di Kupang, sehingga bisa menciptakan peluang lain bagi wirausahawan setempat.

Hotel juga bisa didorong untuk membangun jaringan dengan pengusaha lokal untuk menawarkan berbagai pengalaman budaya seperti yang sudah disebutkan di atas.

3. MENGUMPULKAN SUMBER DAYA PEMERINTAHAN UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN USAHA

Strategi yang sudah digariskan di atas – untuk mendukung pariwisata dan pengolahan pertanian – membutuhkan dukungan dan sumber daya bagi para wirausahawan yang berbasis di Kupang untuk bisa menumbuhkan bisnis mereka. Pendekatan yang selama ini ditempuh oleh pemerintah daerah memiliki kendala sebagai berikut. Pertama, kebijakannya bertumpu pada penciptaan usaha mikro yang dijalankan secara individu ketimbang berfokus pada menumbuhkan usaha kecil dan menengah yang bisa menciptakan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik. Kedua, kerangka kebijakan untuk mendukung usaha lokal kurang terkoordinasi dan tidak memiliki manajemen sumber daya yang efektif. Ketimbang mengumpulkan sumber daya dan mengoordinasikan antar lembaga dan departemen, pendekatan saat ini adalah membagi-bagi dana sehingga menjadi sangat kecil; hasilnya sebagian besar program terlalu kecil dan tidak cukup dana untuk bisa punya dampak nyata pada daya dukung kota terhadap wirausahawan lokal.

Pemerintah Kupang harus menyalurkan dananya untuk satu atau dua program yang berdampak besar pada layanan pengembangan usaha. Program ini harus komprehensif: memberikan modal bagi wirausahawan, pelatihan, terhubung dengan pekerja berkeahlian, dan memastikan adanya evaluasi kemajuan wirausahawan dalam menumbuhkan bisnisnya. Ini membutuhkan

dukungan atas satu perusahaan lewat program tahun jamak dan menggabungkan program yang sudah ada, seperti PEM (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat), yang memberikan modal awal, dan program-program lain yang memberikan layanan pengembangan usaha seperti pelatihan dan manajemen keuangan, perencanaan strategis, dan manajemen sumber daya manusia. Skema yang komprehensif juga bisa membantu mengubah cara menjalani sektor usaha kecil di Kupang supaya lebih profesional, untuk mengatasi lingkaran setan saling tidak percaya antara pemberi kerja dan pekerja.

Banyak orang muda di Kupang yang menghadapi tantangan dalam mencari pekerjaan berkualitas tinggi di bursa tenaga kerja yang pada umumnya informal. Kota ini kekurangan tenaga kerja yang efektif sistem informasi pasar.

Pemberian program bantuan ini harus secara kompetitif – diberikan pada inkubasi usaha yang paling menjanjikan. Yang dibutuhkan Kupang bukanlah menciptakan banyak pengusaha mikro yang bekerja sendiri, tetapi membangun jaringan usaha kecil dan menengah yang mampu bertumbuh dan menciptakan lapangan kerja. Lebih penting lagi, program semacam ini harus mendukung perusahaan menjanjikan mana pun supaya punya kesempatan berkembang dan menciptakan lapangan kerja produktif. Baik pemilik usaha migran atau asli Kupang harus bisa mengakses inkubator ini, khususnya bagi banyak pekerja migran yang datang ke Kupang untuk belajar dan memperoleh keahlian yang dapat mendukung pembangunan ekonomi kota.

4. MENCIPTAKAN PLATFORM DIGITAL DAN PUSAT SERBAGUNA BAGI PENCARI KERJA MUDA

Banyak orang muda di Kupang yang menghadapi tantangan dalam mencari pekerjaan berkualitas tinggi di bursa tenaga kerja yang pada umumnya informal. Sementara rekomendasi di atas mencoba menyelesaikan masalah dari sisi permintaan, hal lain yang berkaitan adalah kurangnya sistem informasi bursa tenaga kerja yang efektif di Kupang. Portal berbasis web dikenal tidak terawat dan kurang dimanfaatkan. Namun ada solusi lain, yang telah dijadikan proyek percontohan di beberapa belahan dunia, yaitu menciptakan platform berbasis SMS sehingga tidak membutuhkan koneksi internet, melainkan hanya telepon untuk bisa menerima dan mengirimkan pesan singkat. Perusahaan seperti Souktel di Timur Tengah telah sukses membantu orang muda mengakses bursa tenaga kerja melalui platform ini, yang dibangun berdasarkan profil yang disusun dari pertanyaan singkat mengenai pendidikan terakhir, keahlian, riwayat pekerjaan, dan aspirasi yang dikirimkan melalui SMS, lalu membagikan jenis pekerjaan yang relevan dan kesempatan pelatihan secara reguler. Jika sektor swasta setempat secara aktif terlibat dan merawat platform seperti ini, para pencari kerja di Kupang akan sangat terbantu. Para migran, banyak di antaranya yang kurang berpengalaman mengarungi bursa tenaga

kerja di Kupang, akan terbantu dengan sistem semacam ini.

Selain peron digital seperti ini, Kupang harus menjawab kebutuhan sebagian besar pekerja migran yang bekerja tanpa perlindungan, banyak di antara mereka yang hidup dan bekerja dalam kondisi yang sangat tidak terjamin. Penelitian kualitatif menunjukkan bahwa beberapa orang muda, khususnya yang putus sekolah pada usia muda, sering tidak makan dan tidur di jalanan. Untuk mendukung populasi ini, sebuah pusat serbaguna bisa didirikan untuk memberi akses layanan publik, konseling, tempat tinggal sementara, loker, dan pelatihan *soft skill* dasar. Tempat ini juga bisa berfungsi bagi orang muda yang situasinya lebih baik untuk memperoleh informasi tentang lowongan pekerjaan dan kesempatan pelatihan. Sebuah pasangan nirlaba bisa menjadi pelaksana yang paling sesuai untuk mengelola pusat kegiatan seperti ini.

5. MENGHAYATI CITA-CITA SEBAGAI SEBUAH "KOTA RAMAH ANAK" DENGAN MENEGAKKAN HUKUM UNTUK PEKERJA DI BAWAH UMUR

Di saat Kupang mendeklarasikan diri sebagai kota "ramah anak", prevalensi pekerja di bawah umur yang tidak terlindungi, misalnya di pasar-pasar tradisional, menjadikan komitmen pemerintah kota dalam melindungi anak sebuah pertanyaan besar. Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan No.13/2003 membolehkan anak berusia 13 sampai 15 tahun untuk dipekerjakan dalam pekerjaan ringan, paruh waktu, di luar waktu sekolah, dan seizin orang tua. Sementara penegakan hukum secara ketat kemungkinan besar tidak akan melindungi pekerja anak – malah akan membuat mereka makin tidak terjangkau – pemerintah Kupang bisa bekerja sama dengan LSM setempat untuk merancang alat intervensi yang efektif dalam membantu para pekerja anak yang tidak terlindungi.

Kesimpulan: Menciptakan Ekonomi Inklusif dan Padat Karya di Kupang

Kupang sedang berada pada sebuah persimpangan sejarah: kota ini memiliki potensi untuk bertumbuh menjadi sebuah sentra kemakmuran dan keragaman di Indonesia timur, menciptakan kesempatan kerja berkualitas tinggi dan jalur mobilitas ekonomi bagi generasi muda di Nusa Tenggara Timur.

Di lain pihak, ada kemungkinan Kupang akan terjebak dalam bursa tenaga kerja yang memberikan sedikit kesempatan kerja berkualitas, gagal memanfaatkan pembangunan infrastruktur pemerintahan dan investasi menjadi ekonomi yang memberikan banyak lapangan kerja, dan tidak mampu membantu generasi muda asal Kupang dan migran untuk mewujudkan potensi mereka.

Pencapaian visi Kupang yang makmur akan tergantung pada mengakui migrasi sebagai sebuah potensi, bukan beban; dengan memanfaatkan sinergi antara pembangunan desa dan kota; mendorong penciptaan lapangan kerja melalui dukungan usaha kecil dan sektor swasta yang hidup, ketimbang menambah banyak usaha perorangan; menyelaraskan program pemerintah dalam mengakses kesempatan kerja, pengembangan keahlian dan penciptaan lapangan kerja; memastikan pelaksanaan kebijakan yang ditujukan untuk mendukung pekerja, kaum muda yang rentan, serta para migran.

Jika diimplementasikan dengan kepemimpinan yang efektif diikuti kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, pendekatan multi-dimensi ini bisa memastikan Kupang dapat mewujudkan ambisi dan aspirasi generasi mudanya.

Catatan akhir

[1] Kementerian Dalam Negeri. (2012). "Jakarta Tertutup Bagi Pendatang Baru". Diunduh dari http://www.kemendagri.go.id/news/2012/08/14/jakarta-tertutup-bagi-pendatang-baru.

[2] The Jakarta Post (2017). Indonesia studies new sites for capital city. [online] Bisa diakses di: http://www.thejakartapost.com/news/2017/04/10/indonesia-studies-new-sites-for-capital-city.html [Diakses pada 18 Juni 2018].

[3] McGee, T. G. (1991). The emergence of desakota regions in Asia: Expanding a hypothesis. Dalam N. S. Ginsburg, B. Koppel, & T. G. McGee (Editor). The Extended Metropolis: Settlement Transition in Asia (hal. 3–25). Honolulu: University of Hawaii Press.

[4] Ellis, P. (2012). The Rise of Metropolitan Regions: Towards Inclusive and Sustainable Regional Development in Indonesia. Jakarta: World Bank. Diunduh dari: http://www.worldbank.org/en/news/feature/2012/08/13/towards-inclusive- and-sustainable-regional-development

[5] Ellis, P. (2012). The Rise of Metropolitan Regions: Towards Inclusive and Sustainable Regional Development in Indonesia. Jakarta: World Bank. Diunduh dari: http://www.worldbank.org/en/news/feature/2012/08/13/towards-inclusive- and-sustainable-regional-development

[6] Perhitungan sendiri dari Sensus Indonesia (2010, 1971).

[7] Bappenas. (2017). *Harnessing Demographic Dividend: The Future We Want* (hal. 11). Jakarta, Indonesia. Diunduh dari http://www.un.org/en/development/desa/population/pdf/commission/2017/keynote/nvp_indonesia.pdf.

[8] Indonesia - Survei Penduduk Antar Sensus 2015, SUPAS

[9] Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2015

[10] Farram, S. G. (2006). FROM 'TIMOR KOEPANG' TO 'TIMOR NTT': A POLITICAL HISTORY OF WEST TIMOR, 1901-1967. Charles Darwin University.

[11] Fox, J. J. (1996). Panen Lontar. *Perubahan Ekologi Dalam Kehidupan Masyarakat Pulau Rote Dan Sawu. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 351 hlm*.

[12] Hägerdal, H. (2012). *Lords of the land, lords of the sea: conflict and adaptation in early colonial Timor, 1600 - 1800*. Leiden: KITLV Press.

[13] van Klinken, G. (2009). Decolonization and the Making of Middle Indonesia. *Urban Geography*, *30*(8), 879–897. https://doi.org/10.2747/0272-3638.30.8.879; van Klinken, G. (2014). *The Making of Middle Indonesia*. Brill. https://doi.org/10.1163/9789004265424

[14] David H, Frank Levy & Richard J Murnane, "The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration," Quarterly Journal of Economics, CXVIII (2003), 1279-1333.

[15] Goos, M., & Manning, A. (2007). Lousy and lovely jobs: The rising polarization of work in Britain. *The review of economics and statistics*, *89*(1), 118-133.

[16] Akhmad, Fandi. Goetha, Marselina Irene. "Produk Domestik Bruto Kota Kupang Menurut Lapangan Usaha." Kota Kupang: Badan Pusat Statistik Kota Kupang, 2017.

[17] Badan Pusat Statistik Kota Kupang, "Kupang City GDP Based on Constant Price 2010-2016."

[18] World Bank Development Indicators, 2010-2016, "General government final consumption expenditure (% of GDP)."

[19] BPS Kota Kupang, "Kota Kupang dalam Angka 2005/2006"; BPS Kota Kupang, "Kota Kupang dalam Angka 2010"; BPS Kota Kupang, "Kota Kupang dalam Angka 2011"; BPS Kota Kupang, "Kota Kupang dalam Angka 2012"; BPS Kota Kupang, "Kota Kupang dalam Angka 2014"; BPS Kota Kupang, "Kota Kupang dalam Angka 2015" (Kota Kupang: Badan Pusat Statistik Kota Kupang, 2016).

[20] Badan Pusat Statistik, 2011-2016, "Kupang dalam Angka"

[21] Ombudsman Republik Indonesia. (2018, 3 Januari). Kota Kupang Masuk Zona Kuning Layanan Publik.

Diunduh tanggal 24 Mei 2018, dari http://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--kota-kupang-masuk-zona-kuning-layanan-publik

[22] Redaksi Timor. (2016, 29 April). NTT Urutan 4 Terbanyak Korupsi – Timor Express. Diunduh tanggal 24 Mei 2018, dari https://timorexpress.fajar.co.id/2016/04/29/ntt-urutan-4-terbanyak-korupsi/

[23] Indonesia - Survei Penduduk Antar Sensus 2015, SUPAS

[24] ibid.

[25] ibid.

JustJobs NETWORK

JustJobs Network adalah organisasi swasta dan non partisan yang meneliti solusi-solusi berdasarkan bukti atas tantangan-tantangan paling menekan saat ini; yaitu bagaimana menciptakan pekerjaan lebih banyak dan lebih baik. Kami menghasilkan penelitian-penelitian empirik, dan memfokuskan kegiatan kami dalam celah pengetahuan kritis pada lansekap lapangan pekerjaan global JustJobs bekerja erat dengan berbagai pihak di dunia, termasuk para penyusun kebijakan, kalangan akademik, dan pimpinan-pimpinan akar rumput untuk mendalami implikasi praktis penelitian kami dan memperkuat dampak penelitian. Melalui kombinasi penelitian terdepan dan berbagi pengetahuan, kami menyasar terjadinya dialog yang segar dan dinamik berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja pada aras nasional, regional dan internasional. Tim kami berkedudukan di New Delhi dan Washington DC.

www.justjobsnetwork.org

CENTRE FOR POLICY RESEARCH

Centre for Policy Research (CPR) adalah sebuah lembaga think-tank yang berdiri sejak tahun 1973. Lembaga ini adalah sebuah lembaga non-profit, dan independen yang mendedikasikan diri untuk menyumbang pada wacana-wacana penting tentang struktur dan proses yang mengubah kehidupan di India.
Mereka yang tergabung dalam CPR adalah para akademisi dan praktisi terkemuka dari berbagai disiplin ilmu lintas spektrum politik. CPR adalah satu dari 27 lembaga riset ilmu sosial yang diakui oleh Indian Council of Social Science Research (ICSSR) dari Pemerintah India. CPR bekerja pada 5 fokus area: ekonomi, lingkungan, hukum, dan tata pemerintahan; hubungan internasional dan keamanan; hukum, peraturan dan negara; dan urbanisasi.

www.cprindia.org

PIKUL
LINGKAR BELAJAR KOMUNITAS BERVISI

PIKUL adalah organisasi non-profit, non-pemerintah yang didirikan pada tahun 1998. Sejak berdirinya itu, PIKUL diberi mandat untuk memperkuat kapasitas lokal dan lembaga-lembaga di Indonesia Timur. Saat ini, PIKUL melayani mandatnya dengan memfasilitasi para "champions" dan masyarakat untuk membuat dan mencapai visi mereka yang resilien.

www.perkumpulanpikul.org

Report design by

Whitespace35

www.whitespace35.com
venkatesh@whitespace35.com
+91 97414 51309